

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan pergantian kepemimpinan di bidang pendidikan, terjadi banyak perubahan kebijakan yang memengaruhi dinamika pendidikan di Indonesia. Salah satu perubahan kebijakan penting yang terjadi pada tahun 2021 adalah penggantian Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Nasional (AN). Perubahan ini diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian nasional oleh satuan pendidikan.<sup>1</sup> Pemerintah menganggap bahwa Ujian Nasional (UN) memiliki keterbatasan dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional karena lebih menekankan pada pengukuran kompetensi berpikir tingkat rendah dan kurang mendorong penggunaan metode pengajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*). Ini tidak sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengedepankan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kompetensi yang relevan dengan tuntutan zaman, seperti yang diwujudkan dalam Kurikulum 2013.

Sebagai respons terhadap hal ini, pemerintah telah menetapkan tahun 2020 sebagai tahun terakhir pelaksanaan Ujian Nasional. Hal ini menandakan adanya perubahan kebijakan dalam sistem penilaian dan evaluasi pendidikan di Indonesia. Kebijakan Asesmen Nasional yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim bertujuan untuk menggantikan ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar

---

<sup>1</sup> Devi Erlistiana, dkk, 2022, Penerapan Kurikulum dalam Menghadapi Perkembangan Zaman di Jawa Tengah, *Al-fâhim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), hlm. 1-15

siswa, serta mengubah cara evaluasi pendidikan dalam era peningkatan mutu pendidikan pada abad ke-21.<sup>2</sup> Implementasi Asesmen Nasional mengacu pada indikator dari Programme for International Student Assessment (PISA), sebuah tes internasional yang dilakukan setiap 3 tahun terhadap siswa usia 15 tahun di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengukur kompetensi siswa secara global.

Partisipasi Indonesia dalam PISA memungkinkan negara untuk mengukur dan membandingkan kemampuan siswa dengan negara lain. Berdasarkan survei tahun 2022 yang dilaporkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Indonesia mengalami peningkatan peringkat dalam hasil PISA. Meskipun demikian, rata-rata kemampuan siswa Indonesia dalam literasi atau membaca mencapai skor 359 dari rata-rata global sebesar 469, sedangkan dalam matematika mencapai skor 366 dari rata-rata global. PISA adalah survei evaluasi pendidikan yang mengukur seberapa baik siswa berprestasi di sekolah menengah. Literasi, numerasi/matematika, dan sains adalah tiga komponen utama penilaian.<sup>3</sup> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa pengembangan karakter dan promosi literasi menjadi elemen krusial dalam kemajuan suatu bangsa dalam menghadapi tantangan era globalisasi.

Asesmen Nasional (AN) merupakan inisiatif evaluasi mutu yang diterapkan pada setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. AN menggantikan Ujian Nasional (UN) yang sebelumnya dilaksanakan. Perbedaan utama antara AN dan UN terletak pada fokus AN yang tidak hanya menilai pencapaian kognitif siswa, tetapi juga menggali hasil belajar sosial-emosional melalui survei yang diberikan kepada siswa.

---

<sup>2</sup> Heti Aisah, dkk, 2021, Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM, *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), hlm. 128-135

<sup>3</sup> Tommy K. Rony, 2019, Skor Terbaru PISA: Indonesia Merosot di Bidang Membaca, Sains, dan Matematika, *Liputan6*, hlm. 1-3

Survei ini mencakup aspek sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dapat mempengaruhi tindakan dan performa siswa dalam berbagai konteks yang relevan. Untuk memperoleh informasi yang komprehensif, Asesmen Nasional menggunakan tiga instrumen utama, di antaranya AKM, yang bertujuan untuk menilai kemampuan siswa dalam bidang kognitif seperti literasi, numerasi, dan literasi sains. Survei Karakter adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek sosial-emosional siswa, seperti sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku. Survei Lingkungan Belajar digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi dan kualitas lingkungan belajar di sekolah.<sup>4</sup> Dengan memadukan data dari ketiga instrumen tersebut, Asesmen Nasional bertujuan untuk menyajikan gambaran yang lebih mendalam tentang kualitas pendidikan di setiap lembaga pendidikan. Informasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan di masa yang akan datang, dengan memperluas fokus evaluasi tidak hanya pada pencapaian akademik tetapi juga pada aspek sosial-emosional yang penting bagi perkembangan siswa secara holistik.<sup>5</sup>

Asesmen Nasional (AN) membedakan diri dari Ujian Nasional (UN) dengan tidak menekankan penilaian berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan kurikulum. AN lebih berfokus pada pemetaan kompetensi minimal siswa dalam literasi dan numerasi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kemampuan dasar siswa dalam membaca, menulis, berhitung, dan memahami konsep matematika.<sup>6</sup> Selain itu, AN dirancang untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan secara menyeluruh di Indonesia, dengan melibatkan pengukuran dan pemetaan kompetensi siswa sebagai pedoman dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Di sisi lain,

---

<sup>4</sup> Deni Ainur Rokhim et al, 2021, Analisis Kesiapan Peserta Didik Dan Guru Pada Asesmen Nasional (Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar), *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 4(1), hlm. 61-71

<sup>5</sup> Nanda Novita, dkk, 2021, Asesmen Nasional (AN): Pengetahuan dan Persepsi Calon Guru, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1), hlm. 172-179

<sup>6</sup> Syamsul Arifin, dkk, 2021, Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, *Dirāsāt: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 7(1), hlm. 65-78

UN bertujuan untuk menilai pencapaian individu siswa pada akhir jenjang pendidikan. AN juga memiliki jadwal pelaksanaan yang berbeda dengan UN, yaitu dilaksanakan pada kelas 5 SD/MI, 8 SMP/MTs, dan 11 SMA/MA. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendorong sekolah dan guru melakukan perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi AN. Dengan demikian, AN memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar untuk peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat sekolah.<sup>7</sup>

Berdasarkan studi dokumen yang telah dilakukan di SMAN 2 Tangerang Selatan, ditemukan bahwa sebelumnya Ujian Nasional (UN) untuk siswa kelas XII menggunakan pola *Paper Based Test* (PBT) atau UNKP (Ujian Nasional dengan Kertas dan Pensil) sebagai metode evaluasi kompetensi siswa di akhir jenjang SMA. Namun, dari tahun 2017 hingga 2019, Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Nasional (UN) diadakan secara bersamaan dengan penggunaan komputer, yang dikenal sebagai UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer). Pada tahun 2020, ujian akhir kelulusan tetap dilaksanakan, namun dengan kebijakan yang disesuaikan oleh masing-masing sekolah, mengacu pada pedoman yang ditetapkan terkait pandemi Covid-19 yang melanda wilayah Indonesia dan negara-negara lainnya secara umum. Evaluasi merupakan bagian penting dalam setiap kebijakan pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk memverifikasi bahwa tujuan program dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah disusun.

SMAN 2 Tangerang Selatan dipilih sebagai tempat penelitian karena sekolah tersebut telah melaksanakan Asesmen Nasional (AN) sejak tahun 2020, dan pada tahun 2023 akan memasuki tahun ketiga pelaksanaan AN. Dengan telah melaksanakan AN sejak tahun 2020,

---

<sup>7</sup> Deni Ainur Rokhim et al, 2021, Analisis Kesiapan Peserta Didik Dan Guru Pada Asesmen Nasional (Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar), *JAMP: Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan*, 4(1), hlm. 61-71

SMAN 2 Tangerang Selatan telah memiliki pengalaman dan konsistensi dalam pelaksanaan evaluasi. Hal ini dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai proses evaluasi, tantangan yang dihadapi, dan dampak dari implementasi AN dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan memasuki tahun ketiga pelaksanaan AN, SMAN 2 Tangerang Selatan dapat dianggap sebagai sekolah yang telah mencapai tingkat kematangan dalam mengelola evaluasi. Ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui evaluasi yang terus-menerus.

Asesmen Nasional (AN) merupakan inisiatif evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. AN bertujuan untuk menggambarkan input, proses, dan hasil pembelajaran di semua satuan pendidikan, dengan mengevaluasi baik aspek akademik maupun aspek sosial-emosional siswa melalui survei yang mencakup sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang relevan dalam konteks pendidikan. Dalam AN tahun 2023, peserta didik kelas XI sebanyak 50 orang dan 74 tenaga pendidik, beserta Kepala Sekolah, telah mengikuti Survei Lingkungan Belajar sebagai bagian dari AN. Survei Lingkungan Belajar adalah salah satu alat yang digunakan dalam Asesmen Nasional (AN) untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan dan kualitas lingkungan belajar di sekolah. AN tahun 2023 menjadi program pengganti Ujian Nasional (UN) yang sebelumnya dilaksanakan. Dengan menggantikan UN, AN diharapkan dapat memberikan evaluasi yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap mutu pendidikan di Indonesia.

Pola penilaian mutu sekolah melalui Asesmen Nasional berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. AN sebagai pengganti UN telah diterapkan selama tiga tahun di beberapa sekolah, termasuk SMAN 2 Tangerang Selatan. Berdasarkan hal itu, memicu keingintahuan yang lebih mendalam bagi peneliti untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan Asesmen Nasional di

SMAN 2 Tangerang Selatan dengan menggunakan model CIPP. Mengevaluasi implementasi Asesmen Nasional tahun 2023 di SMAN 2 Tangerang Selatan akan menjadi fokus menarik yang akan diselidiki dalam penelitian ini. Dengan demikian, peneliti merumuskan judul penelitian menjadi "**Evaluasi Pelaksanaan Asesmen Nasional Pada SMAN 2 Tangerang Selatan**".

### **1.2 Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti tertarik untuk mengevaluasi efektivitas Asesmen Nasional (AN) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Penelitian ini akan mengevaluasi pelaksanaan AN di SMAN 2 Tangerang Selatan dengan menggunakan metode Evaluasi Program Pendidikan model CIPP. Berikut adalah beberapa pertanyaan penelitian yang dirumuskan:

1. Bagaimana gambaran implementasi kurikulum di SMAN 2 Tangerang Selatan?
2. Bagaimana gambaran pelaksanaan Asesmen Nasional di SMAN 2 Tangerang Selatan jika dilihat dari model evaluasi CIPP?
3. Bagaimana analisis hasil evaluasi Asesmen Nasional di SMAN 2 Tangerang Selatan?
4. Bagaimana pelaksanaan Asesmen Nasional dilihat sebagai pelaksanaan fungsi sub-sistem pendidikan secara sosiologis?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi kurikulum di SMAN 2 Tangerang Selatan.

2. Mendeskripsikan pelaksanaan Asesmen Nasional di SMAN 2 Tangerang Selatan jika dilihat dari model evaluasi CIPP.
3. Mendeskripsikan analisis hasil evaluasi Asesmen Nasional di SMAN 2 Tangerang Selatan.
4. Mendeskripsikan pelaksanaan Asesmen Nasional dilihat sebagai pelaksanaan fungsi sub-sistem pendidikan secara sosiologis.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber kepustakaan baru dan referensi bagi Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Sosiologi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk mengeksplorasi topik tentang Asesmen Nasional.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini memiliki manfaat dalam memberikan sumbangan hasil penelitian di bidang Sosiologi Pendidikan terkait evaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional.

#### **b. Bagi Sekolah**

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pelaksanaan Asesmen Nasional di sekolah.

#### **c. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dengan harapan dapat memberikan masukan yang berharga mengenai pelaksanaan Asesmen Nasional di lapangan.

## 1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Untuk membantu penulis dalam proses penelitian, tinjauan penelitian sejenis ini menggunakan tiga belas jurnal internasional, sepuluh jurnal nasional, lima tesis atau disertasi, dan sepuluh buku yang relevan. Berikut ini adalah studi literatur tinjauan penelitian sejenis yang akan menunjukkan hasil dari penelitian tersebut pada masing-masing.

Dalam jurnal berjudul "Persepsi Guru terhadap Implementasi Asesmen Nasional sebagai Alat Evaluasi Sistem Pendidikan di Min Batanghari" yang ditulis oleh Nur'ainah, Muazza, dan K.a. Rahman, hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi siswa Indonesia dalam literasi membaca, matematika, dan sains cenderung rendah. Hal ini menyoroti kebutuhan akan reformasi sistem asesmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Asesmen Nasional (AN) yang dijadwalkan digelar pada tahun 2021 sebagai pengganti Ujian Nasional (UN), diharapkan mampu mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan nasional dengan mengacu pada standar pendidikan abad ke-21, yang menekankan pengembangan keterampilan seperti penguasaan teknologi informasi, kemampuan belajar inovatif, dan partisipasi aktif dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Studi Usar Naely et al., Evaluasi Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2021 di SMA Negeri 4 Rejang Lebong, kemudian memperkuat hal ini. Penelitian ini berpendapat bahwa evaluasi diperlukan untuk setiap kebijakan yang diterapkan agar tujuan program dapat dicapai sesuai dengan rencana. Sebagai bagian dari Asesmen Nasional tahun 2021 di SMA Negeri 4

---

<sup>8</sup> Nur'ainah, dkk, 2022, Persepsi Guru Tentang Implementasi Asesmen Nasional Sebagai Alat Evaluasi Sistem Pendidikan di MIN Batanghari, *M A N A Z H I M: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 4(2), hlm. 412

Rejang Lebong, dari tanggal 27 hingga 30 September, 35 siswa kelas XI dan 67 guru dan kepala sekolah mengikuti Survey Lingkungan Belajar.<sup>9</sup>

Dalam penelitian berjudul "Problematika Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Sekolah di Kabupaten Seruyan" yang dilakukan oleh Abdul Gofur, Muzakki, Slamet Riyadi, Rio Irawan, dan Muhimatul Aliyah, hasil studi menunjukkan bahwa pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat 72 dari 77 negara dalam tiga aspek PISA, yaitu membaca (peringkat 72 dari 77 negara), matematika (peringkat 72 dari 78 negara), dan sains (peringkat 70 dari 78 negara). Posisi ini kemungkinan tidak mengalami perubahan signifikan dalam sepuluh hingga lima belas tahun terakhir. Indonesia termasuk dalam negara yang menggunakan hasil PISA sebagai acuan dalam kebijakan pendidikan. Sejak tahun 2019, Ujian Nasional (UN) telah dihapus berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2021, diperkenalkan Asesmen Nasional (AN) yang dilandaskan pada Program Merdeka Belajar, yang mengacu pada hasil PISA dan TIMSS. Langkah ini membawa dampak penting dalam pergeseran paradigma evaluasi sistem pendidikan serta pemetaan hasilnya.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Ayu Kharismawati dalam artikelnya "Evaluasi Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer di Sekolah Dasar Terpencil" menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah terpencil dalam mengimplementasikan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Artikel tersebut menyoroti bahwa ANBK mensyaratkan akses perangkat komputer dan koneksi internet yang andal secara online. Namun, kenyataannya tidak semua sekolah memiliki infrastruktur ini,

---

<sup>9</sup> Usar Naely, dkk, 2022, Evaluasi Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2021 Pada SMA Negeri 4 Rejang Lebong, *ALIGNMENT: Journal of Administration and Educational Management*, 5(2), hlm. 300

<sup>10</sup> Abdul Gofur, dkk, 2023, Problematika Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Sekolah di Kabupaten Seruyan, *ADAARA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 13(1), hlm. 1-2

terutama di sekolah-sekolah yang tergolong dalam kategori 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Contohnya adalah SDN Remo di Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana siswa harus mencari sinyal internet dengan mendaki bukit atau pergi ke kampung tetangga. Ketersediaan perangkat keras, internet, dan jaringan lokal sekolah menjadi kunci keberhasilan ujian komputer. Masalah ini sering dihadapi oleh guru, siswa, dan orang tua di sekolah-sekolah terpencil. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pelaksanaan ANBK memerlukan dukungan lingkungan sekolah yang memadai dan fasilitas yang memadai.<sup>11</sup>

Studi Analisis Kebijakan tentang Pedagogi dan Penilaian Pendidikan" yang dilakukan oleh Ade Raini, Nyayu Khodijah, dan Ermis Suryana, mengungkapkan bahwa program "Merdeka Belajar" memiliki empat poin kebijakan inti. Salah satunya adalah penghapusan ujian nasional (UN) yang digantikan oleh Asesmen Nasional (AN), yang meliputi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Tujuan utama dari implementasi Asesmen Nasional (AN) adalah untuk mengevaluasi efektivitas manajemen pemerintah dalam sistem pendidikan dan kinerja keseluruhan sistem pendidikan.<sup>12</sup>

Amrullah Aziz dalam penelitiannya menegaskan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, tidak hanya elemen input dan output yang perlu diperhatikan, tetapi juga aspek proses seperti pengambilan keputusan, manajemen program, pengelolaan institusi, kegiatan belajar mengajar, serta monitoring dan evaluasi. Dalam konteks ini, belajar mengajar dianggap memiliki peran yang paling krusial dibandingkan dengan prosedur lainnya. Selain itu, sistem pendidikan secara keseluruhan, termasuk manajemen sistem dan budaya kerja, kualitas dan

---

<sup>11</sup> Kharismawati, dkk, 2022, Evaluasi Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer di Sekolah Dasar Terpencil, *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 7(2), hlm. 229-230

<sup>12</sup> Ade Raini, dkk, 2022, Analisis Kebijakan tentang Pedagogi dan Penilaian Pendidikan (AKM=Asesmen Kompetensi Minimum, Survey Karakter dan Survey Lingkungan Belajar), *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), hlm. 133

kuantitas guru, kurikulum, serta fasilitas fisik, semuanya berkaitan erat dengan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Deni Ainur Rokhim dan rekan-rekannya dalam artikel "Analisis Kesiapan Peserta Didik dan Guru pada Asesmen Nasional" menyoroti Asesmen Nasional (AN) sebagai bentuk evaluasi pendidikan yang relatif baru di Indonesia. Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P3GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memulai persiapan implementasi AN dengan melakukan uji coba instrumen Survei Karakter dan Lingkungan Belajar di 22 sekolah di Aceh, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat, dari tanggal 12 Juni 2020 hingga 24 Juli 2020. Uji coba ini bertujuan untuk memvalidasi keandalan instrumen tersebut. Meskipun demikian, pemahaman mengenai peran dan jenis asesmen nasional masih kurang di kalangan pelaku pendidikan seperti kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Sebagai pengganti Ujian Nasional (UN), AN dianggap akan tetap dilakukan pada tingkat akhir pendidikan, yaitu kelas 6 SD/MI, kelas 9 SMP/MTs, dan kelas 12 SMA/MA/SMK, dengan tidak membedakan mata pelajaran dalam proses evaluasinya.<sup>14</sup>

Dalam penelitian mereka yang berjudul "Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Asesmen Nasional Pengganti Ujian Nasional di SMAN 2 Samarinda", Robiatul Adawiah, Darwis, dan Nizar Aulia Noor menjelaskan bahwa evaluasi kualitas pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional. Ujian nasional telah menjadi topik kontroversial yang memicu banyak diskusi di kalangan pihak berwenang, terutama di kalangan pendidik. Proses pra-, saat-, dan pasca-ujian nasional sering kali menimbulkan tantangan tersendiri. Siswa diharapkan

---

<sup>13</sup> Amrullah Aziz, 2015, Peningkatan Mutu Pendidikan, *Jurnal Studi Islam*, 10(2), hlm. 1

<sup>14</sup> Deni Ainur Rokhim et al, 2021, Analisis Kesiapan Peserta Didik dan Guru Pada Asesmen Nasional (Asesmen Kompetensi Minimum, Survey Karakter, dan Survey Llingkungan Belajar), *JAMP: Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan*, 4(1), hlm. 62

untuk mempersiapkan diri dengan baik agar mereka bisa meraih nilai tertinggi yang dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Ini merupakan hasil dari permasalahan yang dihadapi oleh ujian nasional. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul seputar ujian nasional, beberapa kebijakan baru telah diperkenalkan. Salah satunya adalah implementasi Asesmen Nasional, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional.<sup>15</sup>

Studi Yulia Indahri dalam artikel "Asesmen Nasional sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional" menguatkan bahwa Asesmen Nasional (AN) dan Ujian Nasional (UN) memiliki perbedaan signifikan dalam fungsi dan substansinya. AN didesain untuk mengawasi serta mengevaluasi seluruh sistem pendidikan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dibandingkan UN, AN lebih fokus pada evaluasi yang menyeluruh terhadap input, proses, dan hasil pendidikan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait kinerja sistem pendidikan nasional. Sebab AN bukan merupakan penilaian individu bagi siswa, guru dan sekolah bertanggung jawab untuk menilai kemampuan siswa. Karena tidak berdampak pada nasib siswa secara individu dan tidak digunakan sebagai syarat penerimaan siswa baru (PPDB), AN tidak menambah beban siswa. Pelaksanaan AN pada tahun 2021 sangat penting mengingat tidak adanya UN pada tahun 2020. Terlebih lagi, sejak dimulainya pandemi, data yang lengkap belum tersedia untuk menilai hasil belajar serta dampak yang signifikan dari pandemi COVID-

---

<sup>15</sup> Robiatul Adawiah, dkk, 2021, Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Asesmen Nasional Pengganti Ujian Nasional di SMAN 2 Samarinda, *Borneo Journal of Primary Education*, 1(2), hlm. 183-184

19. Tanpa pelaksanaan AN pada tahun 2021, pemerintah akan kesulitan mengetahui mana sekolah dan daerah yang paling memerlukan perhatian ekstra untuk mengejar ketertinggalan.<sup>16</sup>

Dalam penelitian oleh Muhammad Yusuf dan Tasman Hamami yang berjudul "Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menyiapkan Peserta Didik dalam Menghadapi Tes Asesmen Kompetensi Minimum", disorot bahwa Nadiem Anwar Makarim mengkritik lembaga pendidikan yang tidak melakukan penilaian pembelajaran secara independen. Dalam kerangka kebijakan Merdeka Belajar dan Kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan beberapa perubahan signifikan, termasuk memberikan kewenangan kepada setiap lembaga pendidikan untuk menyusun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) mereka sendiri, menggantikan Ujian Nasional (UN) dengan survei karakter dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), memberikan kebebasan kepada guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta menyesuaikan regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPSB) sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Format soal AKM menyerupai soal PISA (Program Penilaian Internasional), mencakup berbagai jenis soal seperti pilihan ganda kompleks, uraian singkat, uraian panjang, menjodohkan, benar-salah, ya-tidak, dan lain-lain. Oleh karena itu, guru Pendidikan Agama Islam perlu mengembangkan model pembelajaran yang mampu membimbing dan melatih peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Baharun, Hefniy, Ahmad Fauzi, Faridy, dan Rhini Fatmasari bertajuk "Manajemen Asesmen Nasional Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Dampaknya pada Kecerdasan Emosional Peserta Didik". Temuan dari

---

<sup>16</sup> Yulia Indahri, 2021, Asesmen Nasional sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(2), hlm. 198-199

<sup>17</sup> Muhammad Yusuf dan Tasman Hamami, 2022, Peran Guru Pendidikan Agama Islam Menyiapkan Peserta Didik dalam Menghadapi Tes Asesmen Kompetensi Minimum, *JURNAL BASICEDU*, 6(2), hlm. 3016

penelitian tersebut menunjukkan bahwa MIN 1 Probolinggo menjadi sekolah dasar pertama yang menerapkan asesmen nasional berbasis komputer pada tahun pelajaran 2017-2018. Sekolah ini menjadi model bagi sekolah dasar lain di seluruh Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini dinilai cukup efektif, karena berdasarkan hasil kajian, pelaksanaan ujian menggunakan sistem manajemen strategis, yaitu semua bentuk kegiatan dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Efektifitas kegiatan asesmen nasional berbasis komputer di MIN I Probolinggo, secara signifikan dapat mempengaruhi manajemen pendidikan dan menjadi model pendidikan di masa depan, meskipun secara psikologis banyak siswa yang tidak memahami soal ujian.<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh HY Suhendi, D Mulhayatiah, D Nasrudin, dan R Ardiansyah berjudul "Pengembangan Instrumen Survei Karakter dalam Asesmen Nasional Indonesia untuk Guru Fisika" menjelaskan bahwa pada tahap analisis dilakukan wawancara untuk menentukan kebutuhan instrumen survei karakter untuk dikembangkan di sekolah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa di beberapa sekolah di daerah Jawa Barat instrumen survei karakter tidak ada dan guru hanya menggunakan penilaian dalam buku guru. Di beberapa sekolah lain, instrumen survei karakter ada, tetapi tidak diketahui validitas dan keandalan mereka. Tahapan perancangan dalam pembuatan instrumen survei karakter adalah sebagai berikut: 1) Pengecekan kurikulum SMA, 2) Membuat cetak biru instrumen survei karakter menggunakan skala likert, 3) pembuatan rubrik penilaian. Pada tahap ini membuat item statement berdasarkan cetak biru yang telah dibuat. Selanjutnya, ahli bahasa, ahli penilaian, dan ahli materi menguji instrumen survei karakter yang telah dibuat. Pada titik ini, produk yang telah diubah dan divalidasi oleh para ahli diuji dalam uji coba terbatas. Dalam uji coba terbatas,

---

<sup>18</sup> Hasan Baharun, 2019, National Assessment Management Based On Information And Communication Technology And Its Effect On Emotional Intelligence Learners, *Journal of Physics: Conference Series*, 3

guru diberi alat penilaian karakter untuk menilai profil siswa pancasila yang mereka lihat selama pembelajaran. Instrumen ini diberikan kepada 50 siswa di beberapa sekolah di Kab wilayah Jawa Barat. Pada tahap validasi oleh ahli penilaian survei karakter instrumen berdasarkan profil siswa pancasila diperoleh beberapa evaluasi. Beberapa dari evaluasi meliputi: a) Indikator atau perilaku yang diamati pada instrumen survei karakter, b) kalimat pengeditan pada instrumen survei karakter. Peneliti melakukan revisi sebelum melakukan uji coba terbatas.<sup>19</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maria Eugenia Ferrao yang berjudul "Evaluasi Kemajuan Siswa dalam Pendidikan Menengah Pertama di Brasil: Menjelajahi Jalur untuk Kesetaraan" menjelaskan tentang mengkaji sosiodemografi individu dan atribut pendidikan terkait dengan kemungkinan kemajuan siswa melalui pendidikan umum menengah pertama di Brasil. Studi ini adalah yang pertama di Brasil untuk memberikan bukti rela-hubungan antara latar belakang sosial siswa, pembelajaran mereka, dan promosi yang sukses di seluruh LSE; itu didasarkan pada data longitudinal dengan cakupan nasional dari sensus pendidikan dan Prova Brasil. Hasil diperoleh dari model multilevel logistik, yang diterapkan pada Prova Brasil – Data tahun 2011 dikumpulkan dari kelompok siswa kelas 5, dipasangkan pada satuan siswa dengan sensus pendidikan tahun 2015 masing-masing data. Tantangan memutus siklus negatif ketidaksetaraan pendidikan harus menjadi perhatian yang signifikan tidak hanya untuk pembuat kebijakan, kepala sekolah, guru, dan orang tua, tetapi juga kepada pemerintah kota, negara bagian, dan pemerintah federal. Karena beberapa sekolah lebih efektif daripada lain, tidak hanya dalam arti umum, tetapi juga dalam arti setara efektif untuk semua kelompok (misalnya, anak laki-laki dan perempuan, kelompok etnis minoritas, dan mereka yang terkena

---

<sup>19</sup> HY Suhendi, dkk, 2021, Development Of Character Survey Instruments In National Assessment Of Indonesia For Physics Teachers, *Journal of Physics: Conference Series*, 2

kemiskinan ekstrim), mengatasi ketimpangan membutuhkan upaya bersama dari semua bagian yang terlibat. Selain itu, kami menunjukkan variabilitas yang tidak dapat dijelaskan dari non-pengulangan nilai di antara kotamadya dan negara bagian sama besarnya dengan variabilitas di seluruh sekolah. Utama pendidikan sekolah dan prasekolah muncul sebagai lokasi yang tepat untuk menjalankan program yang dirancang dengan baik.<sup>20</sup>

Juuso Henrik Nieminen, Päivi Atjonen, and Ana Remesal dalam penelitiannya yang berjudul "Keyakinan Orang Tua Mengenai Evaluasi: Kerangka Konseptual dan Temuan dari Pendidikan Dasar di Finlandia" menjelaskan bahwa sebagian besar orang tua memahami penilaian melalui konsepsi pedagogis yang secara keseluruhan selaras dengan cita-cita Penilaian Pembelajaran. Konsepsi seperti itu menciptakan buah dasar untuk mengembangkan kemitraan pendidikan antara sekolah dan rumah. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks penilaian berisiko rendah, seperti di Finlandia, orang tua tidak boleh menilai terlalu tinggi data numerik atau menolak inovasi penilaian, bertentangan dengan apa studi sebelumnya telah menyarankan di konteks test-driven (Harris, 2015; Ratnam-Lim & Tan, 2015). Temuan kita tidak hanya mewakili budaya penilaian tetapi budaya sekolah Finlandia secara keseluruhan, karena tidak ada sekolah yang kompetitif dan pasar aktivitas setelah sekolah seperti yang dicatat dalam penyelidikan sebelumnya di Hong Kong dan Singapura (Wong et al., 2020; Yan & Brown, 2021). Jadi, kita mengingatkan premis sosio-kultural dan historis untuk keyakinan orang tua tentang penilaian. Keyakinan tentang praktik penilaian paling sering mewakili konsepsi penilaian pedagogis. Konsepsi pedagogis lebih umum di semua kecuali satu kategori, yaitu kepercayaan. Namun, konsep penilaian masyarakat masih kuat hadir dalam dataset kami. Ini adalah temuan yang menarik mengingat Finlandia menawarkan konteks

---

<sup>20</sup> Maria Uegenia Ferrao, 2022, The Evaluation Of Students' Progression In Lower Secondary Education In Brazil: Exploring The Path For Equity, *Studies in Educational Evaluation*, 1

berisiko rendah tanpa ujian nasional dan inspeksi sekolah. Meski begitu, kepercayaan orang tua sering mengacu pada gagasan penilaian sebagai sebuah proses pengumpulan data numerik, dipandu oleh tujuan Pendidikan Penilaian Pembelajaran.<sup>21</sup>

Penelitian Israel Dunmade yang berjudul "Pendidikan Evaluasi Siklus Hidup di Nigeria: Evaluasi Eksploratif tentang Perkembangan yang Terjadi" menjelaskan tentang eksplorasi survei tingkat penggabungan pendidikan penilaian siklus hidup di lembaga pembelajaran Nigeria yang lebih tinggi. Pembelajaran memeriksa sejumlah kurikulum universitas Nigeria untuk mengidentifikasi di mana dan bagaimana pendidikan penilaian siklus hidup dilakukan. Hasil menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan LCA di Nigeria. Alasan untuk tingkat pendidikan seperti itu adalah karena jumlah sarjana yang kecil dengan paparan LCA di antara dosen universitas Nigeria, proses perubahan kurikulum yang sulit dan sangat rendah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Lifecycle Assessment (LCA) adalah alat komprehensif untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan dari produk, layanan dan sistem energi. Rendahnya tingkat pendidikan LCA di Nigeria disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran LCA oleh sebagian besar masyarakat Profesor Universitas Nigeria. Ini terlepas dari jumlah studi LCA yang relatif signifikan yang telah dilakukan oleh para akademisi di universitas-universitas Nigeria. Tampaknya sedikit usaha/upaya yang telah dilakukan untuk memperkenalkan kursus LCA ke dalam kurikulum teknik universitas dan ilmu lingkungan. Alasan lain adalah kesulitan yang terlibat dalam membuat perubahan kurikulum karena perubahan tersebut biasanya melibatkan banyak protokol sebelum mendapat persetujuan dari NUC dan Council for the Regulation of Engineering di Nigeria (COREN). Pemerintah Federal dan Negara Bagian juga perlu mengembangkan kebijakan/pedoman yang relevan dan

---

<sup>21</sup> Juuso Henrik Nieminen, dkk, 2021, Parents' Beliefs About Assessment: A Conceptual Framework And Findings From Finnish Basic Education, *Studies in Educational Evaluation*, 1

mensponsori inisiatif LCA yang akan mendorong penggunaan LCA. Di antara inisiatif tersebut adalah pemberian beasiswa untuk pelatihan teknik LCA, studi kasus LCA yang disponsori nasional/negara bagian, dan pengembangan basis data nasional. Melakukan hal ini akan menghasilkan manfaat penerapan teknik LCA. Keterlibatan pemerintah melalui pengenalan kebijakan LCC, peraturan, pedoman, dan penegakan LCA penggunaan akan membuat implementasi menjadi lancar.<sup>22</sup>

Penelitian Dineke Tigelaar dan Fred Janssen yang berjudul "Dilema dalam Mendesain Rubrik untuk Penilaian Mahasiswa Calon Guru dalam Pendidikan Guru Kisah tentang Proses Desain dan Evaluasi dalam Konteks Pengajaran Biologi" menjelaskan bahwa program pendidikan guru dari Universitas Leiden, Belanda, adalah program master satu tahun yang terbuka untuk siswa dengan gelar master yang sesuai dan untuk siswa gelar sarjana dengan pengalaman mengajar. Semua guru siswa memiliki pengawas sekolah, guru yang berpengalaman mata pelajaran di sekolah yang dilatih untuk tugas ini. Setiap guru mahasiswa juga memiliki pembimbing universitas, seorang dosen yang mengunjungi mereka di sekolah mereka setidaknya dua kali setahun dan mengamati jumlah pelajaran mereka selama kursus. Portofolio digunakan untuk memantau perkembangan kompetensi calon guru. Pengawas bertanggung jawab untuk modul yang berbeda: Pengawas ini menilai apakah siswa telah memenuhi kebutuhan modul tertentu. Dalam program pendidikan guru kami, kompetensi pengajaran yang dibutuhkan adalah terminologi dalam peran guru: seorang profesional yang mampu mengarahkan perkembangannya sendiri, sebuah mata pelajaran guru, manajer kelas,

---

<sup>22</sup> Israel Dunmade, 2019, Lifecycle Assessment Education in Nigeria: An Exploratory Evaluation of the Tren, *Procedia Manufacturing*, 448

psikolog remaja, anggota organisasi sekolah, dan spesialis akademis dalam topik tertentu. Keenam peran ini berasal dari persyaratan nasional kompetensi guru.<sup>23</sup>

Malin Bogren, Sathyanarayanan Doraiswamy, dan Kerstin Erlandsson dalam penelitiannya yang berjudul "Pengembangan Alat Penilaian Akreditasi Konteks Khusus untuk Memastikan Kualitas Pendidikan Kebidanan di Bangladesh" mengeksplorasi dan menggambarkan 'keharusan' penting untuk dimasukkan dalam konteks khusus alat penilaian akreditasi di Bangladesh. Konfederasi Bidan Internasional (ICM) telah berkembang standar global untuk menginformasikan tenaga kerja kebidanan pada tingkat terpadu dari persyaratan yang diperlukan. Tiga pilar terintegrasi telah diidentifikasi untuk membangun profesi kebidanan: pendidikan, regulasi dan asosiasi (Castro Lopes et al., 2016). Pendidikan, sebagai salah satunya pilar, adalah fokus dari makalah ini. Komponen penting dimasukkan dalam alat akreditasi disajikan di bawah empat kategori kualitatif dan lima domain kuantitatif: 'organisasi dan administrasi', 'fakultas kebidanan', 'badan mahasiswa', 'isi kurikulum', 'sumber daya, fasilitas dan layanan' dan 'strategi penilaian'. Komponen itu yang diidentifikasi akan menjadi prasyarat untuk memastikan mahasiswa kebidanan mencapai hasil belajar kebidanan yang diharapkan kurikulum, dan karenanya berkontribusi pada tenaga kerja kebidanan yang kuat.<sup>24</sup>

Undang Rosidin, Herpratiwi, Wayan Suana, dan Rijal Firdaos dalam penelitiannya berjudul "Evaluation of National Examination (UN) and National-Based School Examination (USBN) in Indonesia" menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih rendah, sebagaimana dibuktikan oleh studi TIMSS 2003. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa prestasi belajar matematika dan IPA siswa kelas 8 Indonesia masih di bawah rata-rata

---

<sup>23</sup> Dineke Tigelaar and Janssen Fred, 2012, Dilemmas In Designing Rubrics For The Assessment Of Student Teachers In Teacher Education, *educación química*, 179

<sup>24</sup> Malin Bogren and Sathyanarayanan Doraiswamy, 2018, Development Of A Context Specific Accreditation Assessment Tool For Affirming Quality Midwifery Education In Bangladesh, *Midwifery*, 74

internasional, dengan skor rata-rata 411 untuk matematika, sedangkan rata-rata internasional mencapai 466. Negara-negara seperti Singapura, Korea, Hong Kong, Tiongkok, dan Jepang menempati posisi teratas, sementara Malaysia berada di atas Amerika Serikat dan rata-rata internasional. Indonesia dan Filipina terletak di posisi bawah di Asia Tenggara. Prestasi siswa dalam sains dan matematika juga menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. Siswa Indonesia memiliki nilai IPA 420, sedangkan skor globalnya adalah 474,6. Mengenai mutu pendidikan, Pemerintah menyelenggarakan UN yang merupakan standar penilaian pendidikan tingkat dasar dan pendidikan menengah di Indonesia. Tujuan UN adalah untuk mengukur dan mengevaluasi kompetensi siswa Indonesia sesudahnya proses belajar mengajar pada akhir setiap jenjang pendidikan (yaitu kelas enam, sembilan, dan dua belas) (Sukyadi & Mardiani, 2011). Hasil ujian UN merupakan bagian dari sistem yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan, serta kebijakan dan pembuat keputusan di tingkat nasional sebagai instrumen dalam meningkatkan pendidikan Indonesia (Hamied, 2010).<sup>25</sup>

Ali Aisyah, Yuliana S. Chelsi, dan Ristian Ria dalam penelitiannya berjudul "Analysis of Ability to Prepare Learning Evaluation Minimum Competency Assessment (AKM) during the Covid 19 Pandemic at SD Negeri 3 Abepura, Jayapura City," menguraikan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengimplementasikan kebijakan berupa Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. AKM merupakan salah satu instrumen evaluasi yang digunakan di tingkat sekolah. Isi praktikum penilaian meliputi literasi dan numerasi. Namun implementasinya sejauh ini belum optimal, kinerja pendidikan sekolah dasar harus ditingkatkan sehingga

---

<sup>25</sup> Undang Rosidin, dkk, 2019, Evaluation of National Examination (UN) and National-Based School Examination (USBN) in Indonesia, *European Journal of Educational Research*, 827

kebijakan ini berhasil. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan orientasi belajar. Salah satu konsep utamanya adalah pendidikan holistik, di mana guru diharapkan mampu mengembangkan seluruh potensi siswa secara seimbang. Ini berarti guru harus dapat mengembangkan semua aspek kehidupan siswa, termasuk kognitif, emosional, fisik, sosial, dan estetika—semua aspek afektif. Soal Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS), yang dapat disusun dengan mengaitkan nilai-nilai karakter, dapat digunakan untuk mempelajari melalui pemecahan masalah. Pendidikan berbasis pemecahan masalah dianggap mampu mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi siswa. Para siswa dari kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak akan mengikuti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di sekolah. AKM ini mencakup literasi dan numerasi, yang melibatkan kemampuan berpikir logis dan sistematis, keterampilan untuk mengolah dan menganalisis data, serta kemampuan berpikir logis dalam menerapkan ide dan informasi yang telah dipelajari. AKM dirancang untuk mengevaluasi kompetensi siswa lebih dari sekadar penguasaan konten belaka.<sup>26</sup>

Tentang penelitian Bambang Suryadi dan Yuli Rahmawati yang membahas Integrasi Nilai-Nilai Moral dalam Asesmen Berbasis Standar: Peluang dan Tantangan dari Ujian Berbasis Komputer dalam Asesmen Nasional Indonesia menjelaskan tentang peluang dan tantangan ujian berbasis komputer dalam penilaian nasional Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem pendidikan berbasis standar, Indonesia menghadapi tantangan, termasuk pelaksanaan penilaian berbasis standar dengan karakteristik yang berbeda di seluruh negeri. Tes berbasis komputer telah diusulkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai langkah inovatif untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Standar pendidikan nasional mencakup

---

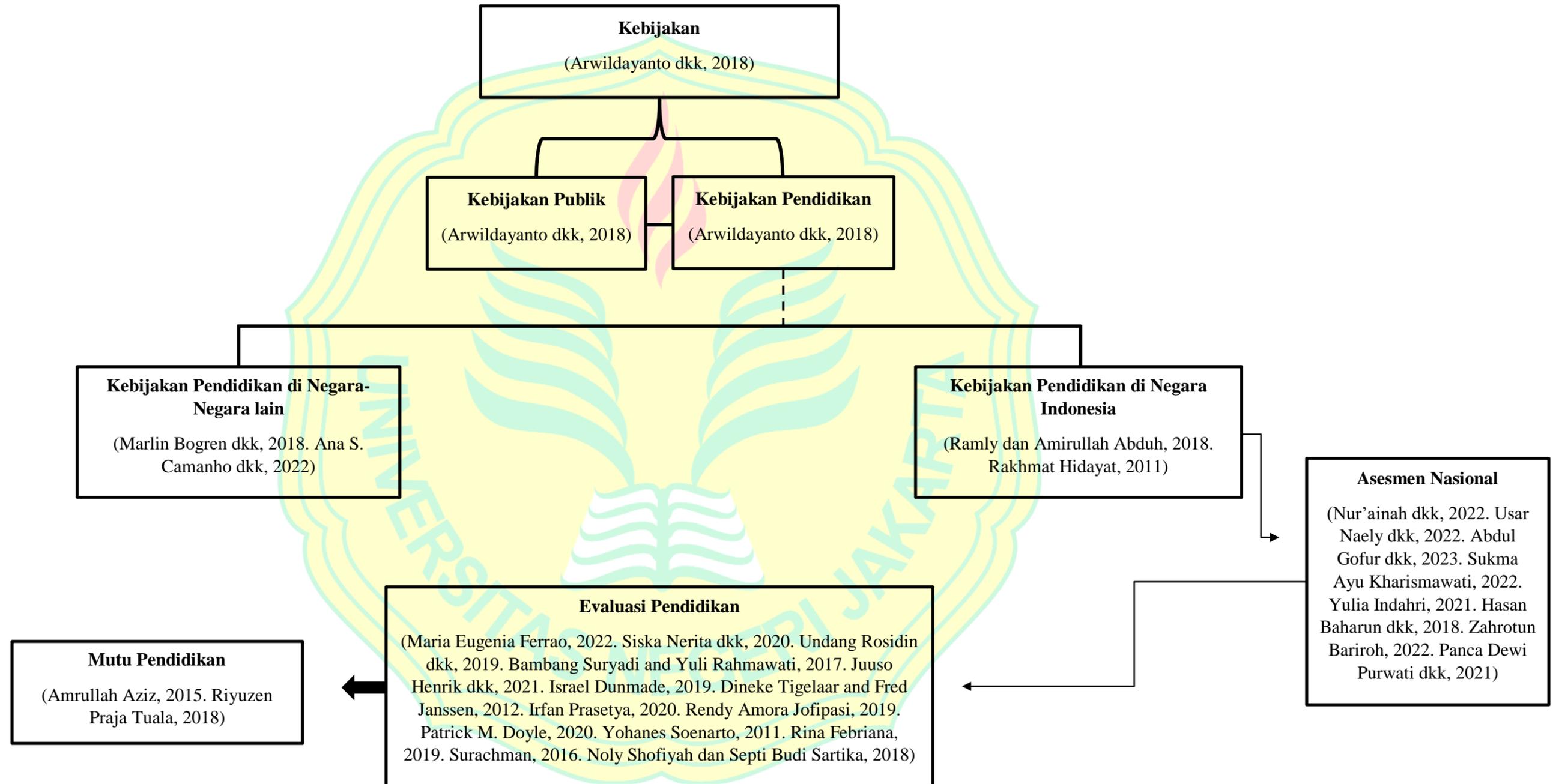
<sup>26</sup> Ali Aisyah, dkk, 2023, Analysis of Ability to Prepare Learning Evaluation Minimum Competency Assessment (AKM) during the Covid 19 Pandemic at SD Negeri 3 Abepura, Jayapura City, *Journal of Educational Analytics*, 131-132

delapan standar yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, yaitu kompetensi lulusan, isi kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi, sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen pendidikan, dan keuangan. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa penilaian nasional dilakukan oleh pemerintah. Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mengatur prosedur pelaksanaan penilaian nasional. Dari ketiga jenis penilaian tersebut, isu yang paling populer adalah penilaian nasional yang dilaksanakan pada bulan Mei untuk SMP (tahun 7-9) dan pada bulan April untuk SMA (tahun 10-12) setiap tahunnya. Asesmen nasional di Indonesia bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi di bidang tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Dalam perspektif yang lebih luas, penggunaan CBT dalam penilaian nasional juga dianggap sebagai cara untuk merevolusi pendidikan dan membangun karakter manusia. Di Indonesia, penggunaan CBT dalam penilaian nasional dimulai pada tahun 2015, dan kemudian berkembang hingga tahun 2016.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Bambang Suryadi dan Yuli Rahmawati, 2017, Integrated Moral Values in Standard-Based Assessment: Opportunities and Challenges of Computer-Based Test in Indonesian National Assessment, *Turkish Online Journal of Educational Technology*, 187

Skema 1.1 Penelitian Sejenis



(Sumber: Analisis Penulis, 2024)

## 1.6 Kerangka Konsep

### 1.6.1 Evaluasi Program Model CIPP

Penelitian adalah proses yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran informasi. Sedangkan evaluasi merupakan penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rencana kegiatan yang sedang, akan, atau telah dilakukan. Tujuannya adalah menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan terkait dengan implikasi dari program tersebut.<sup>28</sup> Program merujuk pada serangkaian kegiatan yang direncanakan dalam suatu rencana yang mencakup kebijakan dan daftar kegiatan yang harus dilaksanakan dalam periode waktu tertentu.<sup>29</sup> Oleh karena itu, evaluasi program dapat didefinisikan sebagai penggunaan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai perancangan suatu program, serta memberikan informasi yang membantu dalam pengambilan keputusan terkait implementasi program tersebut.

Menentukan model dan pendekatan adalah dua langkah yang diperlukan untuk melakukan penelitian evaluasi program.<sup>30</sup> Artinya, penentuan model evaluasi adalah langkah pertama yang harus diambil oleh peneliti yang ingin merancang penelitian evaluasi program. Setelah itu, peneliti menentukan metode penelitian yang tepat untuk menganalisisnya. Secara umum, terdapat tiga pendekatan utama: kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Evaluasi program dapat berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta proses implementasi Asesmen Nasional. Tujuan utama evaluasi adalah untuk memperbaiki untuk menjadi versi yang lebih baik daripada membuktikan sesuatu. Selain itu, tujuan tersebut sesuai

---

<sup>28</sup> Ambiyar dan Muharika, 2019, *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*, Bandung: Alfabeta, Hlm. 70

<sup>29</sup> *Ibid*,

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 76

dengan perspektif Stufflebeam, yang mengemukakan bahwa evaluasi bukan hanya tentang memberikan bukti, tetapi lebih kepada proses perbaikan dan pengembangan program.

Model CIPP, dikembangkan oleh Stufflebeam, adalah model evaluasi yang dirancang untuk menyediakan informasi komprehensif kepada para pengambil keputusan.<sup>31</sup> Model ini memeriksa semua aspek dari objek evaluasi dengan menggunakan data dan informasi dari berbagai sumber untuk membentuk kebijakan. CIPP dikenal karena pendekatannya yang komprehensif, tidak hanya fokus pada hasil akhir tetapi juga mempertimbangkan konteks, masukan, proses, dan produk atau hasil dari program yang dievaluasi. Pendekatan CIPP memperlakukan program yang dievaluasi sebagai sistem yang kompleks.

Seluruh proses pendidikan dimasukkan ke dalam pendekatan yang digunakan di sini untuk sistem ini. Menurut Stufflebeam, evaluasi CIPP terdiri dari:<sup>32</sup>

1. Evaluasi Konteks, yang mencakup keadaan lingkungan, tujuan program, dan kebutuhan yang belum terpenuhi.
2. Evaluasi Masukan, yang mencakup input, yang terdiri dari sarana dan prasarana, guru, peserta, dan staf lainnya.
3. Evaluasi Proses, yang mencakup siapa, kapan, dan apa yang dilakukan program.
4. Evaluasi Produk dalam konteks evaluasi program mencakup analisis terhadap perubahan yang terjadi pada input atau peserta program.

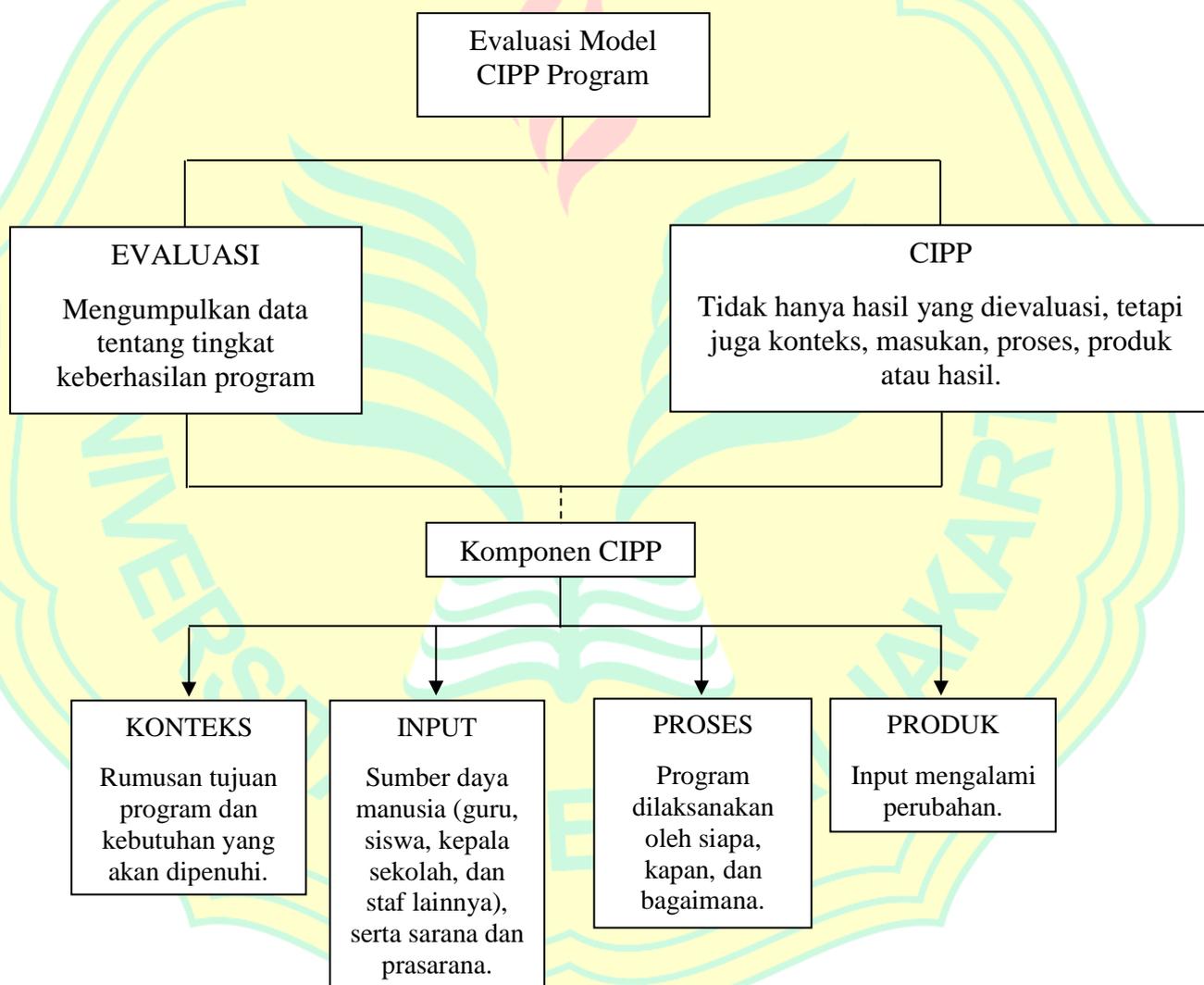
---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm. 176

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm. 177-180

Model CIPP memberikan informasi yang komprehensif melalui empat tahap evaluasi utama: konteks, masukan, proses, dan produk. Model ini didasarkan pada pemahaman bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti karakteristik siswa dan lingkungan mereka, tujuan program, peralatan yang digunakan, serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan program tersebut.<sup>33</sup>

**Skema 1.2 Model Evaluasi CIPP**



(Sumber: Analisis Penulis, 2024)

<sup>33</sup> Rusydi Ananda dan Tien Rafida, 2017, *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*, Medan: Perdana publishing, Hlm. 43

## 1.6.2 Konsep dan Implementasi Kurikulum

Konsep dan implementasi kurikulum merupakan dua aspek yang saling terkait dalam dunia pendidikan. Keselarasan antara konsep dan implementasi kurikulum sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Konsep kurikulum yang baik harus dapat diterapkan dengan efektif dan efisien di dalam lembaga pendidikan. Hal ini akan memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

### 1.6.2.1 Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang diuji coba pada tahun 2004. KBK bertujuan sebagai panduan dan acuan untuk pelaksanaan pendidikan yang bertujuan mengembangkan berbagai aspek pendidikan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) di semua tingkat dan jalur pendidikan, terutama di tingkat sekolah. Dalam konteks Kurikulum 2013, kompetensi didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki seseorang dan telah menjadi bagian dari dirinya. Kompetensi ini memungkinkan individu untuk menunjukkan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik secara optimal.

Ini mengindikasikan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan oleh siswa untuk menyelesaikan tugas pembelajaran sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara keterampilan yang diajarkan di sekolah dengan yang dibutuhkan di dunia kerja. Oleh karena itu, kerja sama yang efektif antara lembaga pendidikan dan dunia kerja menjadi sangat penting dalam implementasi Kurikulum 2013. Terutama dalam proses

menentukan dan mengevaluasi keterampilan yang harus diajarkan kepada siswa, peran guru sangatlah penting. Mereka membantu mendorong siswa untuk lebih baik dalam mengamati, bertanya, berpikir logis, dan mengomunikasikan pengetahuan yang mereka peroleh setelah belajar.<sup>34</sup>

### 1.6.2.2 Kurikulum Merdeka

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah mengumumkan "Kurikulum Merdeka" sebagai upaya transformasi kurikulum sekolah. Langkah ini bertujuan untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan kebutuhan zaman saat ini, serta memberikan lebih banyak otonomi kepada sekolah dalam memilih program pendidikan mereka sendiri. Dengan menekankan pada pembelajaran yang beragam dan esensial, Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada guru dan siswa, mendorong kreativitas, dan inovasi dalam proses pembelajaran. Peserta didik diberi waktu yang memadai untuk mengeksplorasi ide-ide dan mengembangkan kemampuan mereka. Kurikulum ini juga menitikberatkan pada proyek-proyek yang bertujuan untuk memperkuat profil siswa dalam nilai-nilai Pancasila. Tema-tema tertentu yang ditetapkan pemerintah menjadi fokus utama dari Kurikulum Merdeka ini.

Kurikulum Merdeka, sebelumnya dikenal sebagai Kurikulum Prototipe, tidak terikat pada konten mata pelajaran tertentu karena tidak ditujukan untuk mencapai target pembelajaran khusus.<sup>35</sup> Ini merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2013. Keputusan Mendikbudristek Nomor 162/M/2021 tentang Sekolah Penggerak menjelaskan tentang Kurikulum Prototipe sebagai bagian dari Kurikulum Merdeka.

---

<sup>34</sup> Imas Kurniasih, 2022, *A-Z Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)*, Jakarta: Kata Pena, Hlm. 14

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm. 15-16

Kurikulum ini dapat diterapkan oleh sekolah selama periode pemulihan pembelajaran, yaitu dari tahun ajaran 2022/2023 hingga tahun ajaran 2024/2025. Evaluasi ulang kebijakan kurikulum nasional direncanakan pada tahun 2024, berdasarkan hasil evaluasi selama periode pemulihan pembelajaran.<sup>36</sup> Kurikulum Merdeka didesain sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, dengan fokus pada materi inti serta pengembangan bakat dan karakter siswa.

### 1.6.2.3 Perbedaan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka

Perbedaan antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Indonesia melibatkan berbagai aspek, termasuk pendekatan pembelajaran, fleksibilitas kurikulum, fokus pada pengembangan keterampilan, dan peran guru. Pertama, terkait fleksibilitas kurikulum. Meskipun ada beberapa upaya untuk memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam Kurikulum 2013, kurikulum tersebut masih terpusat pada kurikulum nasional yang lebih terstandarisasi. Sebaliknya, Kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak keleluasaan kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal mereka.

Kedua, dalam hal pendekatan pembelajaran. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik terpadu dan menekankan pembelajaran aktif dan kolaboratif. Sedangkan, Kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman praktis, dengan upaya untuk merangsang kreativitas dan inovasi.<sup>37</sup> Ketiga, peran guru. Dalam Kurikulum 2013, guru memainkan peran penting dalam pelaksanaan kurikulum, tetapi proses pengembangan kurikulum lebih terpusat. Dalam Kurikulum Merdeka, guru diharapkan memiliki peran yang lebih aktif dalam

---

<sup>36</sup> Mulyasa, 2023, *Implementasi Kurikulum Merdeka*, Jakarta: Bumi Aksara, Hlm. 3-4

<sup>37</sup> Imas Kurniasih, 2022, *A-Z Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)*, Jakarta: Kata Pena, Hlm. 15-16

merancang dan mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks sekolah.

Keempat, pengembangan keterampilan. Kurikulum 2013 fokus pada pengembangan literasi dan numerasi, bersama dengan pemberdayaan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Sementara itu, Kurikulum Merdeka lebih menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Kelima, pengurangan beban materi. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang cenderung padat. Sedangkan Kurikulum Merdeka berusaha untuk mengurangi beban materi dengan harapan memberikan ruang lebih besar bagi pengembangan kreativitas dan keterampilan praktis. Keenam, relevansi dengan kebutuhan lokal. Kurikulum 2013 berupaya untuk relevan dengan kebutuhan siswa, meskipun mungkin masih terbatas dalam memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menyesuaikan dengan konteks lokal. Di sisi lain, Kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak keleluasaan kepada sekolah untuk merancang kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal mereka.<sup>38</sup>

#### **1.6.2.4 Struktur Kurikulum 2013**

Struktur kurikulum Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas mencakup beberapa bagian yang terdiri dari mata pelajaran wajib dan peminatan. Untuk Madrasah Aliyah, mata pelajaran wajib dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A fokus pada aspek afektif dan kognitif, sedangkan kelompok B fokus pada aspek psikomotor dan afektif.<sup>39</sup> Setelah itu, terdapat kelompok

---

<sup>38</sup> Mulyasa, 2023, *Implementasi Kurikulum Merdeka*, Jakarta: Bumi Aksara, Hlm. 4

<sup>39</sup> Khoirul Huda, dkk, 2016, *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum di Sekolah Menengah atas Keberbakatan Olahraga, Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*, 6(1), Hlm. 31-32

C yang merupakan kelompok peminatan, di mana peserta didik dapat memilih mata pelajaran seperti Bahasa dan Budaya, Matematika, dan Ilmu Sosial. Peserta didik yang berada dalam kelompok peminatan Bahasa dapat memilih mata pelajaran dari Kelompok Peminatan Bahasa dan/atau Peminatan Sosial.

Struktur kurikulum SMA/MA melibatkan penambahan jam belajar sebagai bagian dari persiapan ke perguruan tinggi. Selain mata pelajaran pilihan lintas minat, peserta didik memiliki opsi untuk memilih mata pelajaran pendalaman untuk mendalami pengetahuan dalam salah satu mata pelajaran dalam kelompok peminatan. Penambahan jam belajar ini mengakibatkan peningkatan jumlah jam belajar per minggu, dengan kelas X dari 38 jam menjadi 42 jam, dan kelas XI dan XII dari 38 jam menjadi 44 jam per minggu.

Dengan durasi setiap jam belajar adalah 45 menit, penambahan jam belajar dan pengurangan jumlah kompetensi dasar memberikan kesempatan lebih bagi guru untuk membangun proses pembelajaran yang mengedepankan keaktifan siswa.<sup>40</sup> Proses pembelajaran yang aktif memerlukan lebih banyak waktu daripada proses pembelajaran yang hanya berfokus pada penyampaian informasi. Hal ini dikarenakan peserta didik perlu waktu untuk melakukan observasi, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi dalam diskusi secara lebih intensif. Dengan menambah jam belajar, guru dapat menilai proses dan hasil belajar.

#### **1.6.2.5 Struktur Kurikulum Merdeka**

Kurikulum Paradigma Baru mengadopsi struktur yang menggunakan Profil Pelajar Pancasila (PPP) sebagai landasan untuk menetapkan standar isi, proses, dan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm. 33

penilaian pendidikan, seperti yang dijelaskan di situs Kemendikbud. Struktur kurikulum, capaian pembelajaran (CP), asesmen, dan prinsip pembelajaran harus didasarkan pada standar ini. Sekolah diharapkan untuk menetapkan dan mengembangkan kurikulum mereka sendiri sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang mereka miliki, meskipun struktur kurikulum yang ditetapkan pemerintah masih memberikan panduan yang signifikan. Kurikulum Merdeka terdiri dari dua komponen utama: kegiatan intrakurikuler yang dilakukan di kelas dan kegiatan proyek yang bertujuan untuk mencapai Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum ini menetapkan sekitar 25% dari total jam pelajaran untuk kegiatan proyek.<sup>41</sup>

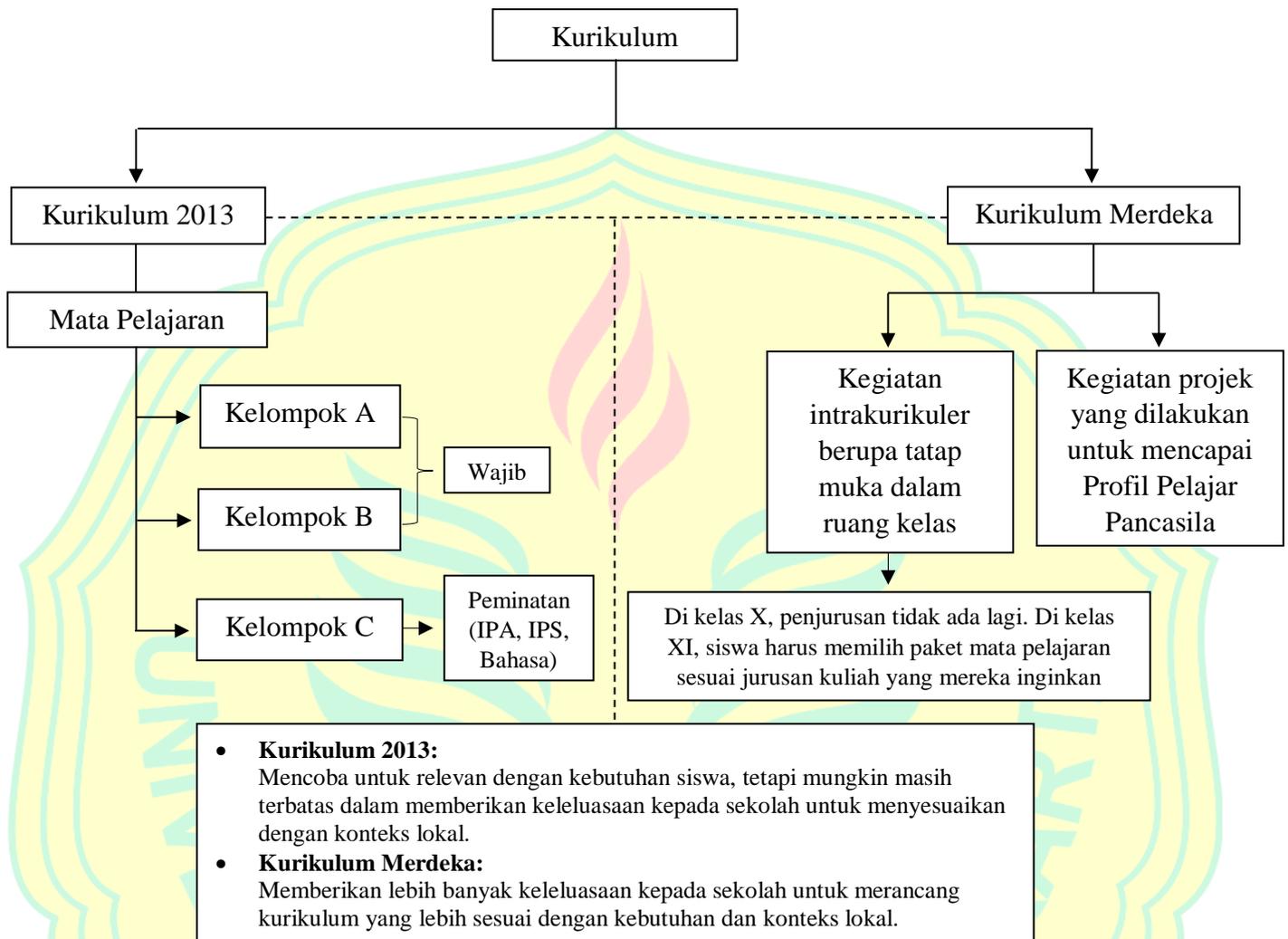
Selain itu, Kurikulum Merdeka tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang dilakukan oleh kurikulum 2013 dan sebelumnya. Kurikulum Merdeka mengurangi beban belajar dengan mengurangi jumlah jam pembelajaran, terutama waktu tatap muka di kelas. Selain itu, kurikulum ini juga mengurangi jumlah materi pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Kurikulum Merdeka berfokus pada meningkatkan kemampuan peserta didik, pembentukan karakter, dan pengembangan kreativitas mereka.<sup>42</sup> Kurikulum Merdeka memiliki tujuh hal penting yang perlu diperhatikan. Ini adalah struktur kurikulum, capaian pembelajaran (CP), pelaksanaan proses pembelajaran, jumlah jam pelajaran, model pembelajaran kolaboratif, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial (IPAS), dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

---

<sup>41</sup> Mulyasa, 2023, *Implementasi Kurikulum Merdeka*, Jakarta: Bumi Aksara, Hlm. 4

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm. 5

### Skema 1.3 Konsep dan Implementasi Kurikulum



(Sumber: Analisis Penulis, 2024)

#### 1.6.3 Asesmen Nasional

Hasil dari Asesmen Nasional digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam merancang kebijakan pendidikan, mengidentifikasi area perbaikan, dan menentukan arah kebijakan pendidikan selanjutnya. Data yang diperoleh dari Asesmen Nasional membantu pemerintah dalam merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

### 1.6.3.1 Pengertian Asesmen Nasional

Asesmen Nasional merujuk pada sistem yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja siswa, sekolah, atau sistem pendidikan negara secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian dan kemajuan siswa dalam berbagai mata pelajaran dan keterampilan tertentu. Selama masa pendidikan formal, asesmen nasional biasanya dilakukan secara berkala di seluruh negeri sebagai bagian dari kebijakan pendidikan yang mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa di Indonesia.<sup>43</sup> Selain itu, diharapkan Asesmen Nasional dapat meningkatkan investasi generasi muda di masa depan. Namun, hasil dari Asesmen Nasional tidak memiliki konsekuensi bagi sekolah, sehingga siswa dan sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus yang dapat menambah beban psikologis.

Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021, Ayat 1 menyatakan bahwa Asesmen Nasional (AN) merupakan metode yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengevaluasi sistem pendidikan di jenjang dasar dan menengah. AN tidak dimaksudkan untuk menilai hasil belajar individu peserta didik atau untuk membandingkan peringkat antar satuan pendidikan atau daerah. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan komprehensif guna menyusun Profil Pendidikan dan Rapor Pendidikan. Semua lembaga pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk lembaga pendidikan Indonesia di luar negeri yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), wajib mengikuti Asesmen Nasional.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Tim Tentor Anak Bangsa, 2022, *TOP Banget Latihan AKM & Survei Karakter SD/MI*, Yogyakarta: Arruzz Media, Hlm. 2

<sup>44</sup> Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, 2019, *Merdeka Belajar*, Kemendikbudristek, Hlm. 28

Peserta Asesmen Nasional terdiri dari siswa yang dipilih secara acak dari kelas V, VIII, dan XI, serta meliputi guru dan kepala satuan pendidikan. Pemerintah pusat melaksanakan Asesmen Nasional sebagai evaluasi sistem pendidikan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan komprehensif dalam bentuk Profil Pendidikan dan Rapor Pendidikan. Profil dan Rapor Pendidikan ini berguna bagi sekolah dan pemerintah dalam mengidentifikasi indikator yang perlu ditingkatkan serta merencanakan program dan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Satuan pendidikan yang mengikuti Asesmen Nasional akan menerima Profil dan Rapor Pendidikan tersebut.<sup>45</sup> Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap satuan pendidikan dapat disusun berdasarkan rekomendasi yang merujuk pada masalah dan akar permasalahan yang diidentifikasi dalam hasil evaluasi.

Asesmen Nasional dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu daring dan semi-daring. Dalam versi daring, peserta tidak perlu disinkronkan oleh proktor; mereka terhubung langsung ke server pusat melalui komputer klien dengan membutuhkan koneksi internet yang stabil. Sementara itu, versi semi-daring melibatkan proses sinkronisasi dan unggah jawaban peserta oleh proktor; peserta terhubung ke komputer proktor dan juga memerlukan koneksi internet yang stabil untuk proses tersebut. Pelaksanaan Asesmen Nasional dapat bervariasi antara negara dan melibatkan berbagai alat penilaian. Asesmen ini memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kualitas pendidikan.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Hlm. 10

### 1.6.3.2 Instrumen Asesmen Nasional

Tiga instrumen digunakan dalam Asesmen Nasional: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Berikut ini adalah penjelasan singkat dari masing-masing instrumen:

#### 1. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan alat untuk mengukur hasil belajar kognitif, khususnya dalam literasi membaca dan numerasi. AKM terdiri dari tiga komponen utama: konten, tingkat kognitif, dan konteks. Kompetensi dasar dalam membaca dan numerasi merupakan keterampilan esensial yang harus dikuasai oleh semua siswa.<sup>46</sup> AKM dilaksanakan pada siswa kelas V, VIII, dan XI dengan jumlah soal yang disesuaikan untuk setiap tingkatan. Tujuan dari AKM adalah untuk mengidentifikasi kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Hasil dari AKM digunakan untuk melacak kemajuan siswa dalam mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan.

**Tabel 1.1 Komponen Asesmen Literasi Membaca dan Numerasi AKM**

Aspek	Literasi Membaca	Numerasi
Konten	Teks Sastra/Fiksi dan Teks Informasi	Bilangan, Aljabar, Geometri dan Pengukuran, Data dan Ketidakpastian
Level Kognitif	1. Menemukan informasi 2. Menafsirkan dan mengintegrasikan 3. Mengevaluasi dan merefleksi	1. Pemahaman 2. Aplikasi 3. Penalaran
Konteks	Personal, Sosial Budaya, Sainifik	Personal, Sosial Budaya, Sainifik

(Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, Kemendikbudristek, 2019)

<sup>46</sup> Yulia Indahri, 2021, Asesmen Nasional Sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial I*, 12(2), Hlm. 195-215

## 2. Survei Karakter

Tujuan dari Survei Karakter adalah untuk menilai sejauh mana karakter siswa mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila. Profil Pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi utama: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpikir kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global.<sup>47</sup> Survei karakter ini mengukur hasil belajar nonkognitif siswa, membantu guru dan sekolah dalam mengembangkan karakter siswa secara menyeluruh dan holistik.

## 3. Survei Lingkungan Belajar

Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) melibatkan kepala satuan pendidikan dan pendidik yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS. Survei ini bertujuan untuk menilai berbagai aspek pendidikan, termasuk layanan pendidikan anak usia dini, pemerataan akses dan kualitas layanan, kualitas proses pembelajaran, pengelolaan satuan pendidikan, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta aspek lingkungan satuan pendidikan yang berdampak pada proses dan hasil belajar siswa.<sup>48</sup> Instrumen ini melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek lingkungan fisik dan sosial di sekolah, seperti fasilitas, ketersediaan sumber belajar, interaksi antar siswa dan guru, serta dukungan yang diberikan oleh sekolah. Survei ini membantu dalam meningkatkan kualitas lingkungan belajar yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran siswa.

### 1.6.3.3 Prinsip Asesmen Nasional

Dibandingkan dengan PISA (*Program for International Student Assessment*) dan TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*), Asesmen Nasional menggunakan standar dan metodologi yang berbeda. Sementara PISA adalah

---

<sup>47</sup> Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, 2019, *Merdeka Belajar*, Kemendikbudristek, Hlm. 28

<sup>48</sup> *Ibid*, Hlm. 31

penelitian internasional yang menilai prestasi akademik siswa di berbagai negara, Asesmen Nasional lebih fokus pada survei karakter dan lingkungan belajar, serta pengukuran kompetensi minimum dalam membaca dan numerasi. PISA, yang diselenggarakan setiap tiga tahun oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), menilai kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains. PISA mengukur kemampuan kognitif siswa dan bagaimana mereka menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadwal edisi ke-8 *Program for International Student Assessment (PISA)* ditunda hingga 2022 karena pandemi COVID-19. Sekitar 690 ribu siswa dari 81 negara, termasuk Indonesia yang merupakan mitra tetap OECD, dinilai pada edisi 2022.

Dalam edisi 2022 dari PISA, populasi siswa usia 15 tahun di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 84,9 persen. Ini adalah tingkat yang sama dengan edisi sebelumnya pada tahun 2018. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Indonesia berhasil meningkatkan peringkatnya sebanyak 5-6 posisi pada PISA 2022 dibandingkan dengan PISA 2018. Meskipun terjadi kenaikan peringkat, Indonesia mencatat penurunan skor pada kemampuan membaca, matematika, dan sains dalam PISA 2022.<sup>49</sup> Meskipun peringkat naik, penurunan skor ini memperpanjang tren penurunan dari edisi sebelumnya. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk terus melakukan evaluasi mendalam terhadap hasil PISA dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan skor dalam kemampuan siswa. Meskipun peningkatan skor PISA merupakan pencapaian yang baik, penurunan skor dalam membaca, matematika, dan sains menunjukkan bahwa

---

<sup>49</sup> Lubis R. B., 2023, Mengulik Hasil PISA 2022 Indonesia: Peringkat Naik, tapi Tren Penurunan Skor Berlanjut, *GoodStats*

sistem pendidikan Indonesia masih perlu diperbaiki. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa di masa mendatang, diperlukan evaluasi yang cermat serta tindak lanjut yang tepat.

**Gambar 1.1 Tren Hasil PISA Indonesia Tahun 2009-2022**



(Sumber: GoodStats, 2023)

Dalam topik kemampuan membaca, Indonesia memperoleh skor rata-rata sebesar 359, turun 12 poin dari edisi sebelumnya dan lebih rendah dari skor rata-rata global sebesar 476, yang merupakan penurunan terbesar dalam lima edisi terakhir PISA. Selain itu, dalam topik kemampuan matematika, yang menjadi fokus utama pada PISA 2022, Indonesia mengalami penurunan skor rata-rata sebesar 13 poin. Pada PISA 2022, Indonesia memperoleh skor rata-rata 383 dalam subjek sains, terpaut 102 poin dari skor rata-rata global. Hasil ini menyamai pencapaian skor pada PISA 2009.<sup>50</sup>

Perlu diingat bahwa Asesmen Nasional dan PISA adalah dua program yang berbeda dengan tujuan dan metodologi yang berbeda pula. Asesmen Nasional lebih berfokus pada pengukuran kompetensi minimum siswa di Indonesia, sedangkan PISA

<sup>50</sup> *Ibid*,

merupakan studi internasional untuk membandingkan performa siswa di berbagai negara. Laporan PISA memberikan gambaran tentang performa akademik siswa di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data dari laporan PISA menunjukkan bahwa peringkat Indonesia dalam hal kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains selalu berada di posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang berpartisipasi dalam PISA. Dalam konteks ini, penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan dukungan yang memadai bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan literasi dan kognitif mereka. Laporan PISA dapat menjadi alat yang berguna dalam mengevaluasi sistem pendidikan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

#### **1.6.3.4 Perbedaan Asesmen Nasional dengan Ujian Nasional**

Asesmen Nasional akan dilaksanakan di semua jenjang pendidikan dan di setiap daerah di seluruh Indonesia pada tahun 2021. Asesmen Nasional terdiri dari tiga bagian utama: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. AKM dan Survei Karakter hanya akan diikuti oleh siswa, sedangkan Survei Lingkungan Belajar akan diberikan kepada siswa, guru, dan kepala sekolah. AKM dirancang untuk mengukur hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Literasi mencakup kemampuan membaca, menulis, menghitung, dan memecahkan masalah, sedangkan numerasi mencakup kemampuan memahami data angka atau kuantitatif.

Dalam AKM, konten yang diukur adalah konten yang penting dan konsisten di setiap kelas dan jenjang pendidikan. Fokus literasi dan numerasi AKM didasarkan pada betapa pentingnya keterampilan ini dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat kerja di

masa depan. Literasi memungkinkan individu untuk menganalisis informasi, memahami situasi, dan memecahkan masalah, sementara numerasi memungkinkan individu untuk menganalisis informasi numerik dan membuat keputusan berdasarkan hasil analisis tersebut. Oleh karena itu, literasi dan numerasi dianggap sebagai kemampuan dasar yang diperlukan oleh siapa pun, tidak peduli apa pekerjaan yang mereka lakukan di masa depan.

**Tabel 1.2 Perbedaan Ujian Nasional dan Asesmen Kompetensi Minimum**

<b>Perbedaan</b>	<b>UN</b>	<b>AKM</b>
Jenjang Penilaian	SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
Level Siswa	Tingkat Akhir	5,8,11, 9 dan 12 (optional)
Subjek Siswa	Sensus seluruh siswa	Sensus sekolah dengan sampel murid
Tingkat Jenis Tes	<i>Highstake</i>	<i>Lowstake</i>
Model Soal	Pilihan Ganda dan Isian singkat (Matematika SMA/SMK)	PG, PGK, Menjodohkan, Isian Singkat, Essay
Periode tes persiswa	4 Hari	2 Hari
Moda Pelaksanaan	Semi Online	Full Online Supervised (utama), Semi Online dan Offline (Sekolah Tertentu)
Metode Penilaian	Computer Based Test (CBT)	Computerized Adaptive Testing (CAT) dengan MultiStage Adaptive Testing (MSAT)
Spesifikasi minimal Infra Sekolah	Server Sekolah, Komputer Client dan BW (jelas)	Server sekolah tidak perlu Komputer Client Memory 2 GB, Resolusi 1360 x 768, dan Windows 7 keatas BW 20 MBps untuk 50 Peserta

(Sumber: Tim Tentor Anak Bangsa, TOP Banget Latihan AKM & Survei Karakter SD/MI, 2022)

Beberapa mata pelajaran, seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan Matematika, diujikan secara terpisah di ujian nasional (UN), dan hasilnya menentukan kelulusan siswa. Beberapa tahun terakhir, soal *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) telah menjadi perbincangan karena tingkat kesulitannya yang berbeda dengan soal UN sebelumnya. Soal *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) dirancang untuk menguji

kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam menyelesaikan masalah. Jenis soal ini diterapkan dalam setiap mata pelajaran yang diujikan dan guru-guru fokus melatih siswa dalam menjawab pertanyaan yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi.

AKM berusaha menghilangkan perbedaan antara mata pelajaran yang diajarkan dan yang tidak diajarkan oleh UN. Semua mata pelajaran dianggap penting untuk diajarkan. Dengan AKM, sekolah dapat melanjutkan pembelajaran dengan normal tanpa percepatan materi yang biasanya dilakukan di semester pertama setiap kelas terakhir. Hal ini mengurangi beban siswa dalam menghadapi bimbingan intensif. Guru dapat berkonsentrasi pada persiapan siswa agar mereka dapat menyesuaikan kemampuan mereka dengan tuntutan zaman. AKM diharapkan dapat menjadi tolak ukur kemampuan siswa dan panduan untuk meningkatkan pembelajaran. Akibatnya, AKM dilakukan di semua tingkat pendidikan dan difokuskan pada siswa kelas 5, 8, dan 11.

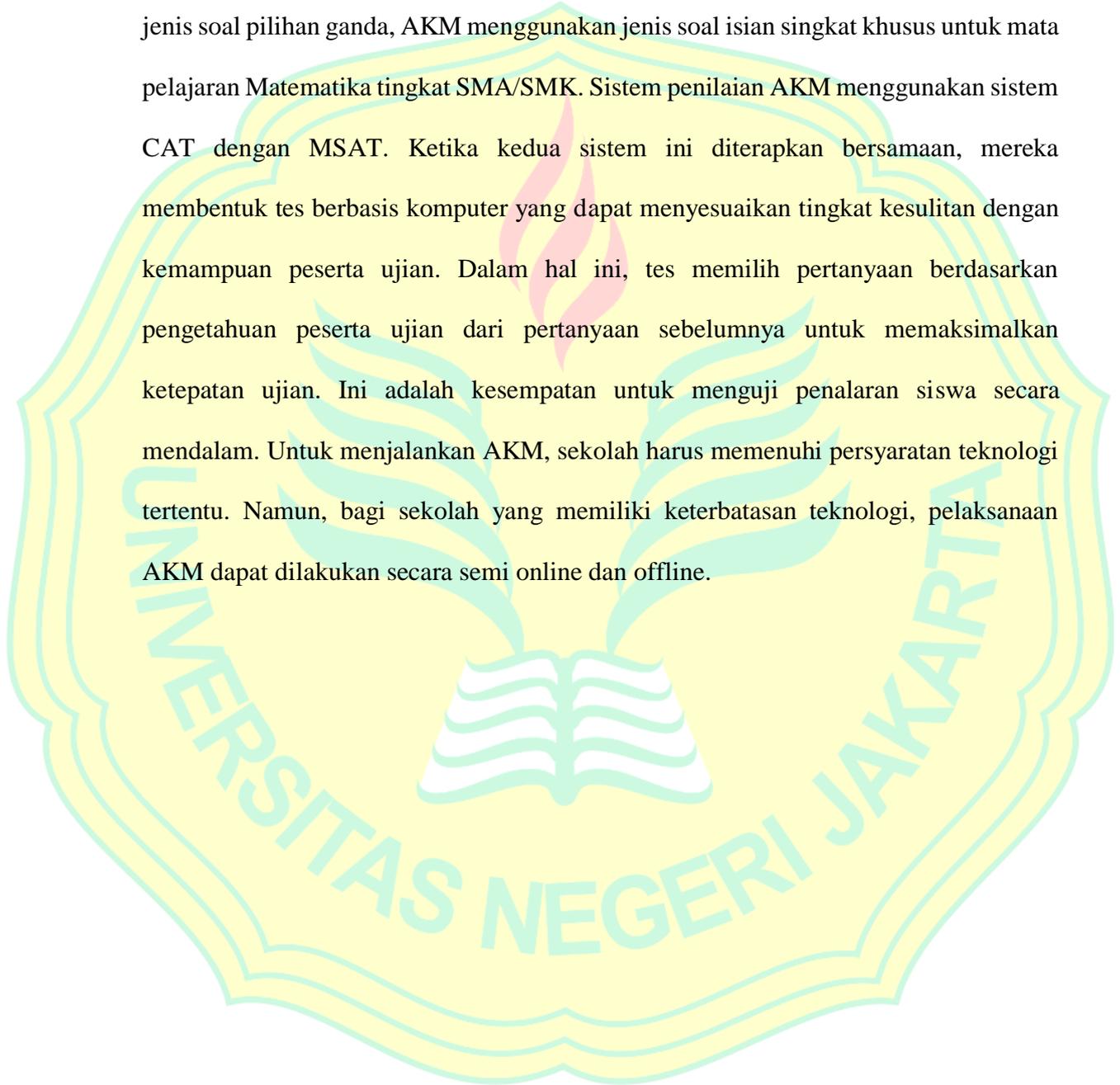
UN adalah ujian yang memiliki konsekuensi yang tinggi. Jika siswa tidak lulus ujian ini, mereka akan mengikuti ujian remedial. Jika masih gagal dengan batas nilai tertentu, siswa tidak dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya. Hasil UN juga menjadi indikator kinerja para guru. Jika hasil belajar siswa baik, kinerja guru dianggap memuaskan. Namun, jika hasil belajar siswa kurang baik, kinerja guru juga dianggap kurang baik. Di sisi lain, AKM bersifat lowstake, yang berarti hasilnya tidak menentukan kelulusan siswa.<sup>51</sup> Siswa tidak merasa terbebani dengan hasil AKM karena ujian ini tidak memiliki konsekuensi yang tinggi. AKM dilakukan dalam dua hari

---

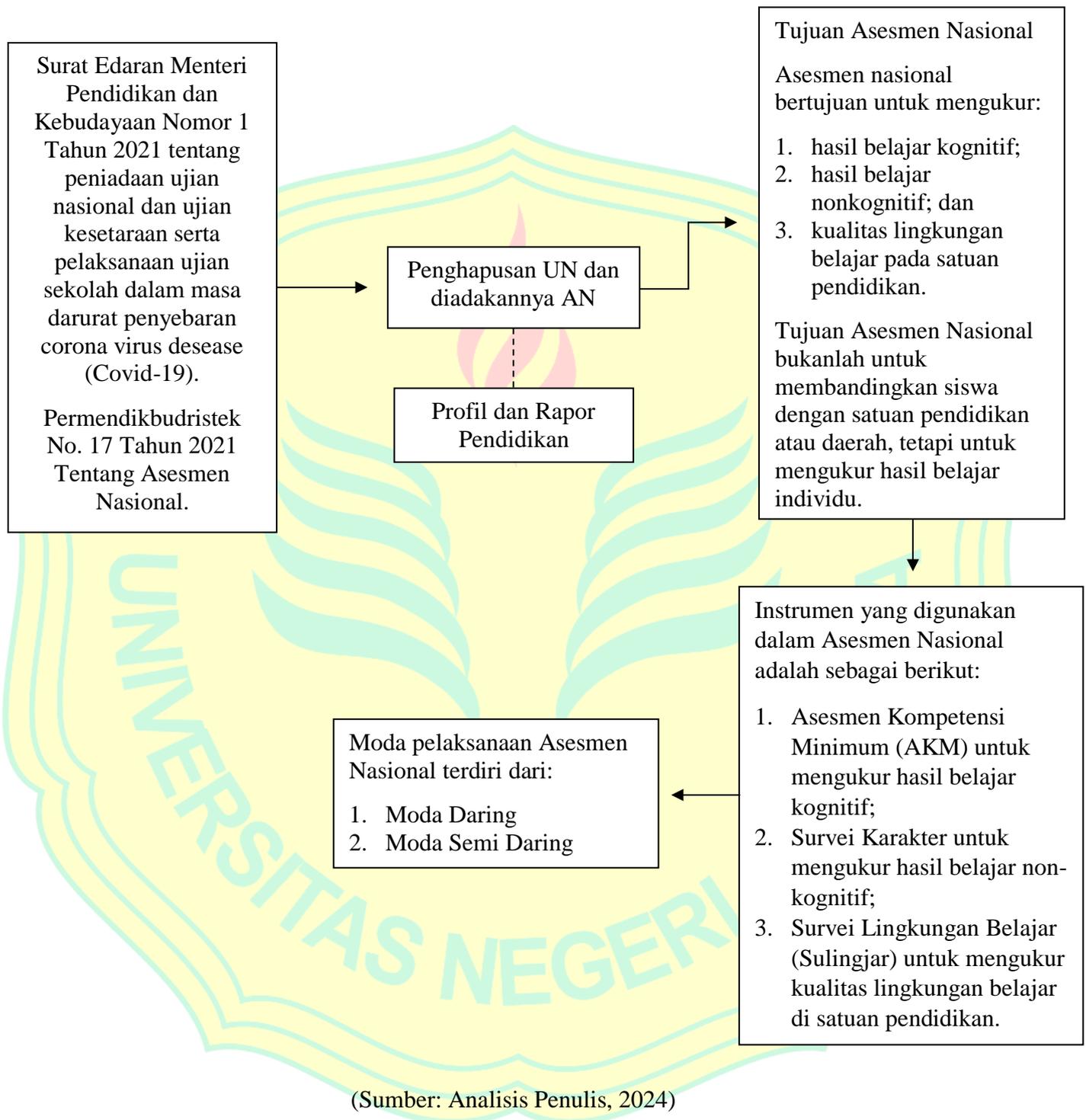
<sup>51</sup> *Ibid*, Hlm. 6

dengan variasi soal yang lebih banyak, termasuk soal pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan soal uraian.

Berbeda dengan UN, yang meliputi 4 hari pelaksanaan dan hanya menggunakan jenis soal pilihan ganda, AKM menggunakan jenis soal isian singkat khusus untuk mata pelajaran Matematika tingkat SMA/SMK. Sistem penilaian AKM menggunakan sistem CAT dengan MSAT. Ketika kedua sistem ini diterapkan bersamaan, mereka membentuk tes berbasis komputer yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan dengan kemampuan peserta ujian. Dalam hal ini, tes memilih pertanyaan berdasarkan pengetahuan peserta ujian dari pertanyaan sebelumnya untuk memaksimalkan ketepatan ujian. Ini adalah kesempatan untuk menguji penalaran siswa secara mendalam. Untuk menjalankan AKM, sekolah harus memenuhi persyaratan teknologi tertentu. Namun, bagi sekolah yang memiliki keterbatasan teknologi, pelaksanaan AKM dapat dilakukan secara semi online dan offline.



### Skema 1.4 Asesmen Nasional



#### 1.6.4 Sistem Tindakan Talcott Parsons

Talcott Parsons mengembangkan konsep sistem tindakan sebagai bagian dari teori aksi sosialnya. Sistem tindakan merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami interaksi sosial antara individu dalam masyarakat.

**Gambar 1.2 Struktur Sistem Tindakan Umum**

Sistem Budaya	Sistem Sosial
Organisme Behavioral	Sistem Kepribadian

(Sumber: Ritzer Georg, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Edisi Kedelapan)*, 2012)

Dalam karya Talcott Parsons, inti dari pemikirannya ditemukan dalam empat sistem tindakan yang merupakan alat analitis untuk menganalisis dunia nyata.<sup>52</sup> Meskipun sistem tindakan ini tidak ada secara fisik dalam realitas, mereka membantu dalam memahami interaksi sosial dan dinamika masyarakat. Salah satu masalah yang sering dikritik dalam karya Parsons adalah fokusnya yang berlebihan pada ketertiban sosial dan kurangnya perhatian terhadap konflik dan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Dalam membaca keempat sistem tindakan Parsons, penting untuk diingat bahwa sistem-sistem tersebut digunakan sebagai alat analitis untuk memahami interaksi sosial. Sistem-sistem tersebut mencakup sistem budaya, system sosial, organisme behavioral, dan sistem kepribadian. Melalui pendekatan ini, Parsons berusaha untuk menjelaskan bagaimana individu bertindak dalam masyarakat, bagaimana nilai dan norma memengaruhi interaksi sosial, dan bagaimana masyarakat menciptakan ketertiban sosial.

Konsep Parsons mengenai sistem sosial dimulai pada level mikro. Level mikro dalam sistem sosial merujuk pada interaksi sosial yang terjadi dalam skala yang kecil,

<sup>52</sup> Ritzer George, 2012, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern (Edisi Kedelapan)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Hlm. 413

seperti interaksi antara individu atau kelompok kecil. Pada level ini, fokus utamanya adalah pada pola-pola interaksi, norma, nilai, dan peran sosial yang mempengaruhi hubungan antarindividu dalam konteks sosial yang lebih kecil. Kedua, level meso. Level meso dalam sistem sosial merujuk pada struktur sosial yang berada di antara skala mikro dan makro. Pada level ini, fokusnya adalah pada organisasi sosial, institusi, atau kelompok yang lebih besar daripada interaksi individu, namun lebih kecil daripada struktur sosial keseluruhan. Contohnya adalah organisasi, komunitas, atau kelompok kerja yang memiliki pola interaksi dan struktur sosial yang khas. Ketiga, kevel makro. Level makro dalam sistem sosial merujuk pada struktur sosial yang lebih luas, kompleks, dan abstrak yang mencakup seluruh masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan. Pada level ini, fokusnya adalah pada pola-pola sosial yang lebih umum, norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan struktur kelembagaan yang memengaruhi seluruh masyarakat.

Talcott Parsons mendefinisikan suatu sistem sosial sebagai kerangka yang didasarkan pada interaksi antara beragam individu yang saling berinteraksi dalam situasi tertentu yang memiliki unsur fisik atau lingkungan.<sup>53</sup> Para individu dalam sistem ini termotivasi oleh keinginan untuk mengoptimalkan kepuasan pribadi mereka dan hubungan mereka dengan situasi yang saling meliputi satu sama lain, didefinisikan, dan dimediasi dalam kerangka sistem simbol yang terstruktur dan diadopsi bersama secara budaya. Dengan demikian, sistem sosial menekankan pada interaksi antara individu, motivasi, struktur simbolis, dan budaya yang membentuk kerangka kerja bagi hubungan sosial dan dinamika dalam masyarakat.

---

<sup>53</sup> *Ibid*,

Dalam analisis sistem sosialnya, Talcott Parsons menunjukkan minatnya pada komponen struktural dan fungsional sistem sosial. Selain memperhatikan peran-status individu, Parsons juga tertarik pada komponen berskala besar seperti kolektivitas, norma-norma, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Meskipun dikenal sebagai seorang strukturalis, Parsons juga dikenal sebagai seorang fungsionalis karena dia mengidentifikasi sejumlah prasyarat fungsional yang diperlukan untuk kelangsungan sistem sosial. Berikut adalah beberapa prasyarat fungsional suatu sistem sosial menurut Parsons:<sup>54</sup>

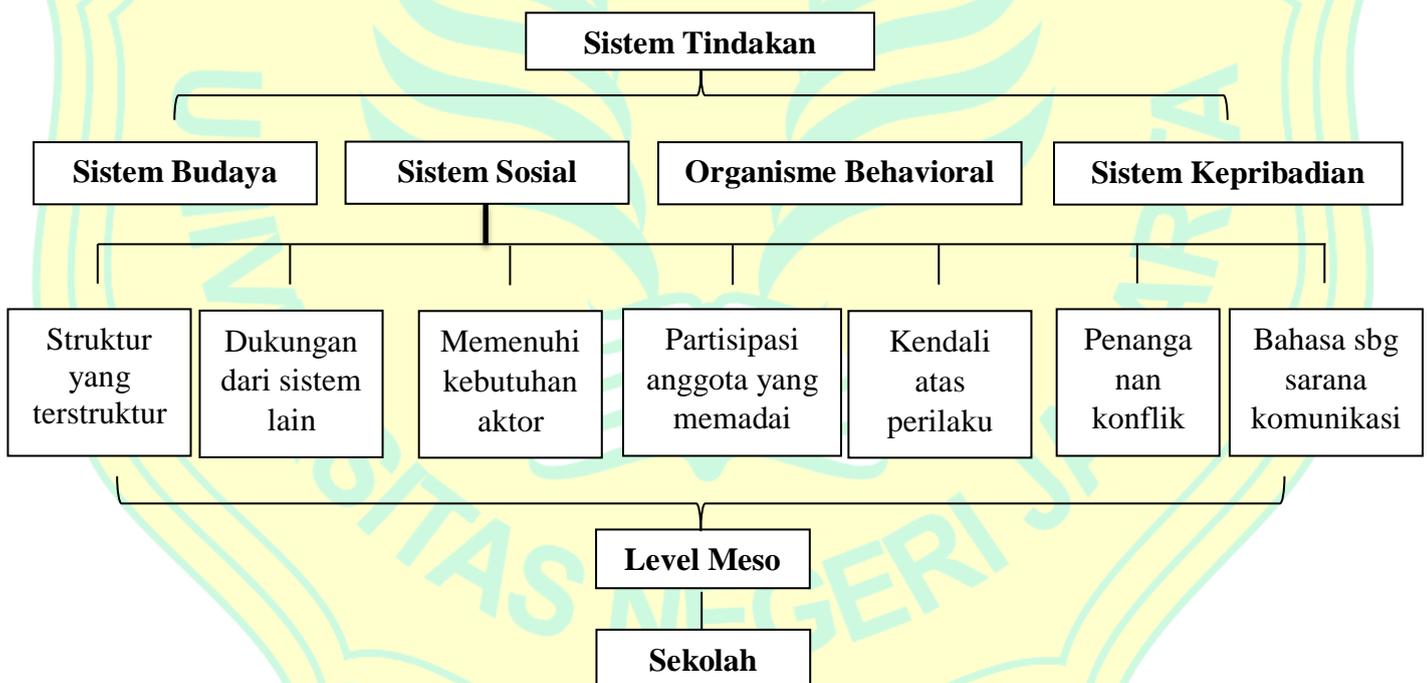
1. Struktur yang Terstruktur: Sistem sosial harus memiliki struktur yang terorganisir agar dapat berinteraksi dengan sistem lain dengan lancar dan efisien.
2. Dukungan dari Sistem Lain: Untuk dapat bertahan dan berkembang, sistem sosial memerlukan dukungan dari sistem lain dalam masyarakat.
3. Memenuhi Kebutuhan Aktor: Sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan signifikan para aktornya, seperti kebutuhan fisik, emosional, dan sosial.
4. Partisipasi Anggota yang Memadai: Partisipasi aktif dari anggota sistem sosial diperlukan untuk menjaga kelangsungan dan keberlangsungan sistem.
5. Kendali atas Perilaku: Sistem sosial harus memiliki kontrol minimal terhadap perilaku yang berpotensi menimbulkan kekacauan atau konflik.
6. Penanganan Konflik: Jika konflik muncul, sistem sosial harus mampu mengelolanya dengan baik untuk mencegah gangguan yang berlebihan.
7. Bahasa sebagai Sarana Komunikasi: Suatu sistem sosial memerlukan bahasa sebagai sarana komunikasi agar interaksi antar anggota dapat berlangsung dengan efektif dan lestari.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, Hlm. 414

Dengan mengidentifikasi prasyarat fungsional ini, Parsons berusaha untuk menjelaskan bagaimana sistem sosial dapat berfungsi secara efisien dan memenuhi kebutuhan individu dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi pemahaman tentang struktur dan fungsi sistem sosial dalam analisis sosiologis. Dalam diskusinya mengenai prasyarat fungsional sistem sosial, Talcott Parsons memfokuskan perhatiannya pada sistem-sistem berskala besar dan hubungan fungsional antara mereka (fungsionalisme masyarakat). Bahkan, ketika membahas peran individu (para aktor), Parsons melihatnya dari sudut pandang sistem secara keseluruhan. Diskusi ini mencerminkan minat Parsons pada pemeliharaan ketertiban dalam sistem sosial.

**Skema 1.5 Sistem Tindakan Talcott Parsons**



(Sumber: Analisis Penulis, 2024)

### 1.7 Hubungan Antar Konsep

Ujian Nasional (UN), sebagai alat evaluasi yang digunakan secara serentak di seluruh Indonesia dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, telah menjadi subjek

kontroversi di kalangan pendidik dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa pelanggaran terhadap Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, baik secara akademis maupun yuridis.

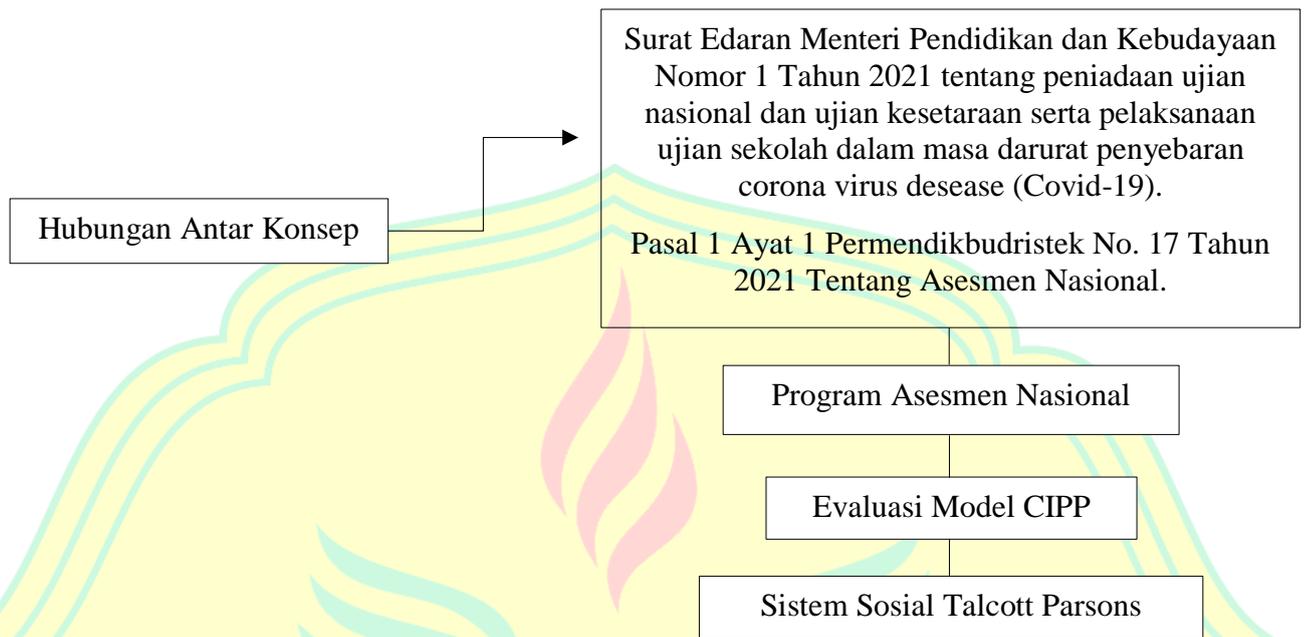
Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2021 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai alternatif, Asesmen Nasional diharapkan dapat menggantikan peran UN dalam pendidikan nasional. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional, Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar adalah instrumen dari Asesmen Nasional. Namun demikian, menjalankan program Asesmen Nasional merupakan tantangan besar karena melibatkan komponen pendukung dan menghadapi beberapa hambatan. Tidak diragukan lagi, proses pelaksanaan Asesmen Nasional tidak selalu lancar. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan penilaian kompetensi minimum. Pertama, karena soal tidak dibahas di kelas dan tidak dipisah berdasarkan mata pelajaran, siswa kurang memahaminya. Kedua, beberapa siswa masih bingung saat menggunakan komputer, terutama mereka yang kurang berpengalaman. Ketiga, tidak ada fasilitas yang cukup. Harus mendapatkan pinjaman dari orang tua siswa dan tenaga pendidik untuk melengkapi perlengkapan yang diperlukan. Karena tidak ada ruang atau laboratorium khusus, tempat pelaksanaan juga menggunakan ruangan perpustakaan.

Keempat, banyak lembaga pendidikan tidak memahami dengan baik bagaimana menerapkan penilaian nasional, yang menyebabkan guru tidak mempersiapkan diri. Kelima, proktor dan pusat berbeda dalam penginputan data. Misalnya, NIK proktor dan EMIS berbeda. Selain itu, guru menghadapi kesulitan saat menyelesaikan survei lingkungan belajar. Karena soal terlalu panjang dan memerlukan banyak analisis, mereka kesulitan memahaminya.

Meskipun ada hambatan, pelaksanaan Asesmen Nasional juga memiliki banyak manfaat. Ini berdampak positif pada peningkatan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, inovatif, kreatif, dan memecahkan masalah. Pendidikan harus menanamkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang merupakan kompetensi abad kedua puluh satu, agar siswa dapat menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah. Selain itu, guru memiliki kemampuan untuk membuat desain dan model pembelajaran yang inovatif, menarik, dan efektif untuk mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa mereka.

Efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan program dipengaruhi oleh banyaknya hambatan yang terlibat dalam proses pelaksanaan Asesmen Nasional. Akibatnya, evaluasi diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan Asesmen Nasional. Dalam diskusinya mengenai prasyarat fungsional sistem sosial, Talcott Parsons memfokuskan perhatiannya pada sistem-sistem berskala besar dan hubungan fungsional antara mereka (fungsionalisme masyarakat) terhadap pelaksanaan AN di SMAN 2 Tangerang Selatan. AN dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan serta memperbaiki kualitas pendidikan dasar dan menengah. Namun, perlu diingat bahwa AN bukan alat untuk menilai setiap siswa secara individual; penilaian kompetensi siswa merupakan tanggung jawab guru dan sekolah. Selain itu, karena AN tidak memiliki konsekuensi langsung bagi siswa dan tidak menjadi syarat penerimaan siswa baru (PPDB), pelaksanaannya tidak akan menambah beban kepada siswa. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan AN menggunakan model evaluasi CIPP serta menganalisis hasil evaluasi AN yang dilakukan di SMAN 2 Tangerang Selatan pada tahun 2023. Kerangka berpikir penelitian akan dibentuk oleh konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti yang ditunjukkan dalam skema berikut.

### Skema 1.6 Hubungan Antar Konsep



(Sumber: Analisis Penulis, 2024)

## 1.8 Metodologi Penelitian

### 1.8.1 Pendekatan Penelitian

Masalah yang diteliti oleh peneliti bersifat dinamis dan sosial. Peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data penelitian. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang perilaku serta kata-kata tertulis atau lisan dari subjek.<sup>55</sup> Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan yang akurat, faktual, dan sistematis mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang ada.<sup>56</sup> Untuk menjelaskan hasil evaluasi, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang kemudian diperkuat dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, meskipun mereka tidak menggunakan SPSS dalam perhitungan. Metode ini dipilih

<sup>55</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Hlm. 27

<sup>56</sup> *Ibid*, Hlm. 28

karena membutuhkan informasi yang mendalam dan bertujuan untuk menjelaskan evaluasi pelaksanaan program Asesmen Nasional di SMAN 2 Tangerang Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Nana Syaodih. Penelitian evaluasi adalah teknik dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menentukan nilai atau manfaat dari suatu tindakan.<sup>57</sup> Penelitian evaluasi diperlukan untuk merencanakan, menyempurnakan, dan menguji praktik-praktik pendidikan yang diterapkan. Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi yang bertujuan untuk membuat keputusan mengenai program yang sedang berjalan. Keputusan ini dapat mencakup melanjutkan program, memperluas program, memperbaiki program, atau menghentikannya.

Dengan menggunakan desain evaluasi, penelitian ini menentukan hasil evaluasi program Asesmen Nasional. Model evaluasi CIPP digunakan di SMAN 2 Tangerang Selatan. Dalam evaluasi CIPP ini, komponen program dievaluasi dengan mempertimbangkan konteks, input, proses, dan produk. Model CIPP dipilih karena relevansi penelitian ini terkait dengan program atau sistem yang sedang digunakan. Untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program, termasuk pelaksanaan program Asesmen Nasional, model ini dipilih karena merupakan model evaluasi yang sangat tepat. Berdasarkan penjelasan ini, peneliti akan memberikan deskripsi komprehensif tentang evaluasi implementasi program Asesmen Nasional di SMAN 2 Tangerang Selatan pada tahun 2023 menggunakan model CIPP.

### **1.8.2 Subjek Penelitian**

---

<sup>57</sup> Vivi Kurnia Herviani, S. I., 2018, Evaluasi Peserta Didik Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Di Kota Bontang, *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 1(2), Hlm. 148

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian memiliki peran yang sangat penting. Sebaliknya, individu yang memberikan informasi terkait data yang diperlukan oleh peneliti disebut informan. Subjek penelitian ini meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dua guru, dan 37 siswa kelas XI dari SMAN 2 Tangerang Selatan yang dipilih untuk mengikuti kegiatan Asesmen Nasional.

**Tabel 1.3 Profil Informan**

No	Nama	Posisi	Cakupan Isi Data
1	Bapak Abu Yazid	Kepala Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Latar belakang dan tujuan pelaksanaan Asesmen Nasional</li> <li>▪ Persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional</li> <li>▪ Pelaksanaan Asesmen Nasional</li> </ul>
2	Bapak Bambang Sutoyo	Wakil Bidang Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manajemen Kurikulum</li> <li>▪ Latar belakang dan tujuan pelaksanaan Asesmen Nasional</li> <li>▪ Persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional</li> <li>▪ Pelaksanaan Asesmen Nasional</li> <li>▪ Hasil Asesmen Nasional</li> <li>▪ Dampak Asesmen Nasional</li> </ul>
3	1. Ibu Aster 2. Ibu Fais 3. Ibu Dwi	Guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Latar belakang dan tujuan pelaksanaan Asesmen Nasional</li> <li>▪ Sosialisasi pelaksanaan Asesmen Nasional</li> <li>▪ Pelaksanaan Asesmen Nasional</li> <li>▪ Proses pembelajaran</li> </ul>
4	1. Azizah Salha. F 2. Revaldina Calista 3. Anastasya Diah 4. Abighail Loutani 5. Valerie Raffela	Siswa Kelas XI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi pelaksanaan Asesmen Nasional</li> <li>▪ Pelaksanaan Asesmen Nasional</li> <li>▪ Proses pembelajaran</li> <li>▪ Kendala Asesmen Nasional</li> <li>▪ Dampak Asesmen Nasional</li> </ul>
5	37 Siswa	Siswa Kelas XI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evaluasi CIPP</li> </ul>

(Sumber: Analisis Penulis, 2024)

### **1.8.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SMAN 2 Tangerang Selatan, yang terletak di Jalan Raya Serpong Puspitek, Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314. Sekolah ini memiliki lokasi yang sangat strategis, meskipun berdekatan dengan lalu lintas kendaraan, namun tidak terlalu terganggu oleh kebisingan. Sekolah ini berada di pinggir jalan raya besar dan utama, jadi lingkungannya penuh orang dan berpolusi. SMAN 2 Tangerang Selatan juga bersebelahan dengan SMPN 8 Tangerang Selatan. Dalam proses belajar mengajar, jarang terdapat hambatan atau gangguan dari luar sekolah. SMAN 2 Tangerang Selatan telah melakukan Asesmen Nasional sejak tahun 2021, itulah alasan mengapa peneliti memilih sekolah ini sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Agustus 2023 hingga Mei 2024.

### **1.8.4 Peran Peneliti**

Peneliti dalam penelitian ini melakukan observasi langsung untuk melihat realitas sosial di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi Asesmen Nasional Tahun 2023 di SMAN 2 Tangerang Selatan. Peneliti juga terlibat secara aktif di lapangan untuk memperoleh data terbaik. Akibatnya, peneliti dapat mengetahui kondisi sebenarnya. Peneliti juga bertindak sebagai instrumen dalam penelitian ini, dan mereka bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan melaporkan hasil penelitian.

### **1.8.5 Teknik Pengumpulan Data**

Di antara metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1.8.5.1 Observasi**

Peneliti melakukan observasi langsung di lokasi penelitian, SMAN 2 Tangerang Selatan, untuk mengumpulkan data. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyaksikan secara langsung kegiatan yang berlangsung selama pelaksanaan Asesmen Nasional di sekolah tersebut. Observasi dilakukan dengan menggunakan panca indera untuk memperoleh data yang akurat dan melihat proses pelaksanaan Asesmen Nasional serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin muncul dalam implementasinya.

#### **1.8.5.2 Wawancara**

Dengan melakukan wawancara tidak terstruktur, peneliti dapat mengumpulkan berbagai informasi dari informan dalam berbagai situasi dan konteks. Pendekatan ini memungkinkan wawancara tetap lentur dan terbuka, dengan pedoman yang hanya mencakup ringkasan masalah yang akan dibahas. Meskipun tidak terstruktur secara ketat, pertanyaan wawancara menjadi lebih fokus dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Untuk mencegah informan tertekan, peneliti memberi mereka kebebasan untuk menjelaskan dengan nyaman. Kelebihan wawancara adalah kemampuannya untuk memperoleh informasi mendalam yang mungkin tidak bisa diperoleh melalui pendekatan lain yang tidak melibatkan hubungan personal atau interaksi langsung dengan responden.

Peneliti mewawancarai sejumlah informan untuk penelitian ini. Pertama, peneliti mewawancarai Bapak Abu Yazid, Kepala SMAN 2 Tangerang Selatan, untuk mendapatkan informasi tentang latar belakang, tujuan, persiapan, dan pelaksanaan Asesmen Nasional. Selanjutnya, peneliti mewawancarai Bapak Bambang Sutoyo, Wakasek Bidang Kurikulum, untuk mendapatkan informasi tentang manajemen kurikulum, hasil, dan dampak Asesmen Nasional. Wawancara ini memperkuat

informasi tentang latar belakang dan tujuan Asesmen Nasional. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Aster, Ibu Dwi, dan Ibu Fais, guru dan wali kelas XI di SMAN 2 Tangerang Selatan, untuk meningkatkan informasi tentang latar belakang dan tujuan pelaksanaan Asesmen Nasional, proses pembelajaran, sosialisasi, dan pelaksanaan. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah siswa untuk mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran, sosialisasi, pelaksanaan, hambatan, dan pengaruh Asesmen Nasional.

### **1.8.5.3 Angket**

Untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pelaksanaan Asesmen Nasional di SMAN 2 Tangerang Selatan, angket atau kuesioner digunakan. Penelitian ini menggunakan angket tipe tertutup, di mana responden hanya perlu menandai salah satu jawaban yang telah disediakan. Untuk setiap indikator penelitian, skala Likert digunakan untuk memberikan skor dari 1 hingga 4; ini memungkinkan untuk mengetahui dengan jelas apakah responden cenderung setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan. Ini membantu mendapatkan respons yang lebih relevan dari responden.<sup>58</sup>

### **1.8.6 Triangulasi Data**

Teknik triangulasi menganalisis data dengan membandingkannya dengan sumber data lainnya. Tujuan dari teknik wawancara dalam konteks ini adalah untuk memastikan bahwa fenomena yang sedang diteliti dapat dipahami secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang yang relevan. Data yang diperoleh dapat menjadi lebih konsisten, lengkap, dan akurat jika digunakan teknik triangulasi. Mathinson menjelaskan bahwa tujuan penggunaan teknik triangulasi untuk pengumpulan data adalah untuk menentukan apakah

---

<sup>58</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, Hlm. 142

ada ketidaksesuaian atau kontradiksi dalam data yang dikumpulkan. Teknik ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa data konsisten, lengkap, dan pasti.<sup>59</sup>

Tujuan peneliti adalah untuk membandingkan data dari berbagai sumber. Mereka melakukan ini dengan menggunakan teknik triangulasi data. Ini dilakukan untuk mempertimbangkan kemungkinan kesesuaian atau ketidaksesuaian data. Dengan menerapkan teknik triangulasi, penelitian dapat menghasilkan temuan yang lebih bervariasi dan memungkinkan pengujian kebenaran data dari berbagai sumber atau pendekatan yang berbeda. Peneliti melibatkan dua guru pengawas dari SMAN 12 Tangerang Selatan dalam proses triangulasi data. Pilihan informan triangulasi dilakukan untuk mendukung pernyataan penelitian melalui pendapat atau data dari informan triangulasi.

### **1.8.7 Bobot Komponen Evaluasi Program**

Pertama, perhitungan dilakukan dalam angket. Angket ini memiliki kolom perolehan skor, skor ideal, dan presentase. Perolehan skor diperoleh dari hasil penjumlahan masing-masing butir soal, dan skor ideal diperoleh dengan cara berikut:

Skor ideal:

$$Y = \text{Jumlah Responden} \times \text{Bobot Ideal.}^{60}$$

$$Y = 37 \times 4$$

$$Y = 148$$

Jadi, dari semua tabel perhitungan angket, skor 148 adalah skor yang ideal. Setelah itu, perhitungan persentase dilakukan untuk masing-masing item pertanyaan. Rubrik yang berdasarkan komponen CIPP dimasukkan setelah hasil perhitungan angket

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Hlm. 241

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

diperoleh, dan data lengkap ada di lampiran. Hasil perhitungan untuk masing-masing komponen kemudian dijelaskan, dan data lengkap ada di bab 4. Metode berikut digunakan untuk menghitung masing-masing komponen CIPP:

**Tabel 1.4 Bobot Komponen Evaluasi Program**

Komponen	Rumus persentase $P = \frac{fo}{N} \times 100\%$ . <sup>61</sup>  Keterangan dari rumus yaitu P = persentase, fo = perolehan skor, N = skor ideal.	Kategori
Konteks	$P = \frac{fo}{N} \times 100\%$ $P = \frac{8}{8} \times 100\%$ $P = 100\%$	Sangat Baik
Input	$P = \frac{fo}{N} \times 100\%$ $P = \frac{15}{16} \times 100\%$ $P = 94\%$	Sangat Baik
Proses	$P = \frac{fo}{N} \times 100\%$ $P = \frac{15}{16} \times 100\%$ $P = 94\%$	Sangat Baik
Produk	$P = \frac{fo}{N} \times 100\%$ $P = \frac{17}{20} \times 100\%$ $P = 85\%$	Sangat Baik
Hasil seluruh komponen CIPP	$P = \frac{fo}{N} \times 100\%$ $P = \frac{55}{60} \times 100\%$ $P = 92\%$	Sangat Baik

(Sumber: Analisis Penulis, 2024)

Ket:

Kurang: 0% -25%

Cukup: 26%-50%

Baik: 51%-75%

Sangat Baik: 76%-100%

## 1.9 Keterbatasan Penelitian

Asesmen Nasional pertama kali diterapkan pada tahun 2021 sehingga data yang tersedia masih seadanya.

<sup>61</sup> Riduwan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 73

### 1.10 Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan disusun dalam struktur yang terdiri dari tiga bagian pokok: pendahuluan, isi, dan penutup, yang masing-masing dibagi menjadi lima bab. Setiap bab akan terdiri dari subbab yang saling terhubung dan mendiskusikan topik secara terstruktur dan sistematis. Proses ini akan mempermudah analisis data dan menentukan kesesuaian pembahasan dalam skripsi ini. Latar belakang masalah, permasalahan penelitian, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan dibahas dalam bab pertama. Gambaran umum SMAN 2 Tangerang Selatan diberikan dalam bab kedua. Beberapa subbab terdiri dari bab ini, termasuk pengantar tentang topik yang dibahas; profil SMAN 2 Tangerang Selatan, yang mencakup identitas sekolah dan hubungannya dengan kurikulum; implementasi kurikulum di SMAN 2 Tangerang Selatan, yang mencakup gambaran umum kurikulum dan program yang dilaksanakan; dan penutup bab.

Bab ketiga berisi hasil temuan penelitian yang didasarkan pada metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Bab keempat mengevaluasi hasil dari pelaksanaan Asesmen Nasional dengan komponen CIPP. Bab ini menguraikan komponen-komponen CIPP, termasuk konteks, tujuan, dan dasar hukum; input, termasuk kesiapan sekolah, guru, peserta didik, dan peralatan laboratorium; sosialisasi, pelaksanaan, interaksi, kendala, dan solusi; dan produk, yang mencakup hasil Asesmen Nasional dan dampaknya. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, termasuk pengantar, analisis hasil Asesmen Nasional di SMAN 2 Tangerang Selatan, program Asesmen Nasional dari sudut pandang sosiologi, dan penutup bab. Bab kelima dan terakhir dari skripsi menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian.